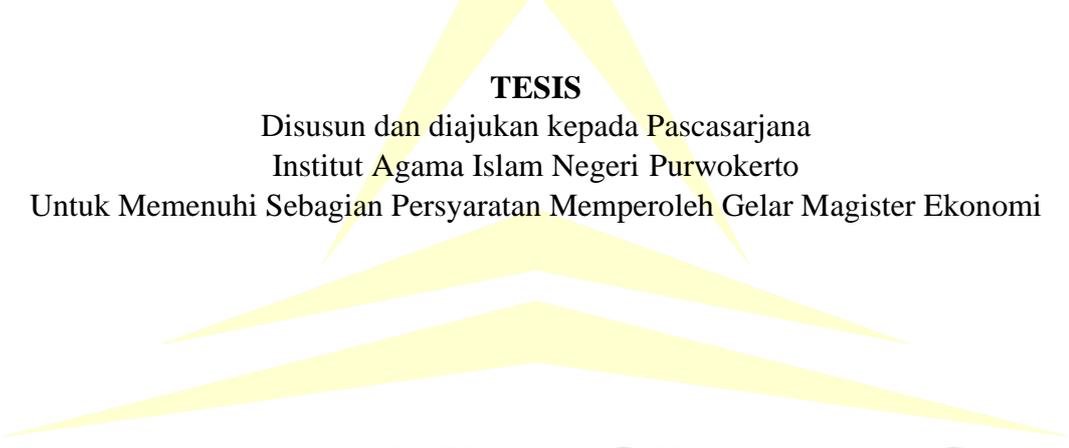


**PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS) PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi



**IAIN PURWOKERTO**  
KAROMAH UMIATI  
NIM.1617611004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
TAHUN  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iaipurwokerto.ac.id](http://www.pps.iaipurwokerto.ac.id) Email : [pps@iaipurwokerto.ac.id](mailto:pps@iaipurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 061/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Karomah Umiati  
NIM : 1617611004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga)

Telah disidangkan pada tanggal **11 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 25 Februari 2021  
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO PASCASARJANA  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website: <http://pps.iainpurwokerto.ac.id> E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

### PENGESAHAN TESIS

Nama : Karomah Umiati  
NIM : 1617611004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Supani, S.Ag, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		25/2/2021
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP.19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		
3	Dr. H Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		25 Feb 2021
4	Dr. H. Achmad Siddiq,S.H.,M.H.I., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		25/02/2021
5	Dr. Hj.Nita Triana, S.H.,M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		25 Feb 2021

Purwokerto, 12 Februari 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr.H.Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Karomah Umiati  
NIM : 1617611004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)

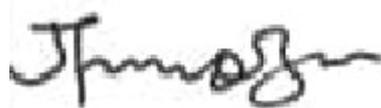
Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 12 Februari 2021

Pembimbing



Dr.H.Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:  
“ *Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)*”  
seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 12 Februari 2021

Hormat saya,



(Karomah Umiati)

## ABSTRAKSI

### **PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**

**Karomah Umiati**

Email: [karomahumiasari@gmail.com](mailto:karomahumiasari@gmail.com)

Jurusan PascaSarjana Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang bersifat *top down* menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu maka ada program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis program PAMSIMAS dalam perspektif masalah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Setelah terkumpulnya data dalam penelitian deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan di Desa Baleraksa melibatkan masyarakat sejak dari: (1) perencanaan yaitu masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, (2) dalam proses pelaksanaan yaitu masyarakat bersama-sama bergotong royong dalam penyediaan air minum dan sanitasi, (3) pengendalian dan pengawasan yaitu masyarakat ikut serta dalam keberlanjutan program tersebut. Program PAMSIMAS yang dilaksanakan dilihat dari perspektif masalah sudah sesuai karena berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan untuk kebutuhan saat ini dan mendatang.

*Kata Kunci: Program PAMSIMAS, Masalah*

*COMMUNITY-BASED DRINKING AND SANITATION PROGRAM  
(PAMSIMAS) MASLAHAH PERSPECTIVE  
(Case Study in Baleraksa Village, Karangmoncol District, Purbalingga  
District)*

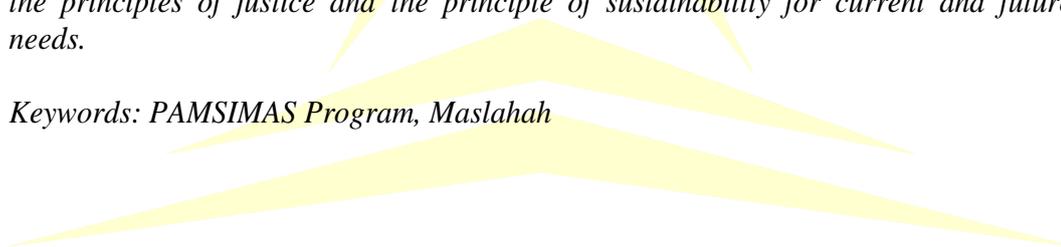
**ABSTRACT**

*The top-down Water Supply and Sanitation Program creates injustice. Therefore, there is a community drinking water supply and sanitation program. This study will analyze the PAMSIMAS program from a masalahah perspective.*

*The research method used is qualitative with interview techniques, observation and documentation as data collection tools. After collecting data in descriptive research to get conclusions from the research results.*

*The results showed that the community based drinking water and sanitation program (PAMSIMAS) implemented in Baleraksa Village involved the community from: (1) planning, namely the community being involved in decision making, (2) in the implementation process, namely the community working together in provision of drinking water and sanitation, (3) control and supervision, namely the community participating in the sustainability of the program. The PAMSIMAS program which is implemented from the perspective of masalahah is appropriate because it is based on the principles of justice and the principle of sustainability for current and future needs.*

*Keywords: PAMSIMAS Program, Masalahah*



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ....	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	ḍammah	u	u

## 2. Voka lrangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَوْلٌ = haula

## C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَـ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
اِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُـ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

## D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

### 1. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضة الأطفال = *rauḍah al-aṭfah* atau *rauḍatul aṭfal*

المدينة المنورة = *al-madinah al-munawwarah* atau *al-madinatulmunawwarah*

طلحة = *Ṭalḥah*

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

نَزَّلَ = *nazzala*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = AbūBakr

### H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ = al-Bukhārī

أبيّ = Abī

أبوه = Abūhu

### I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.



## **MOTTO**

**MAN JADDA WAJADA**  
**(SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL)<sup>1</sup>**



Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak tuyatno dan ibu siswati yang selalu memberikan motivasi dan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>1</sup> <https://www.unas.ac.id/berita/cerita-akbar-zainudin-si-penulis-man-jadda-wa-jada-tentang-unas/>, di akses 4 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB.

2. Almamaterku Fakultas Pasca sarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
3. Kedua saudaraku Amanah Aida Quran dan Karom Amirutama yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat terbaikku di pascasarjana IAIN Purwokerto Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu berjuang dalam menuntut ilmu.
5. Keluarga bani samammad yang selalu mendoakan terbaik tanpa henti.



Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis Berjudul; “***Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)***” dengan tepat waktu. Tanpa pertolong-Nya tentunya kami tidak dapat menyelesaikan Tesis ini

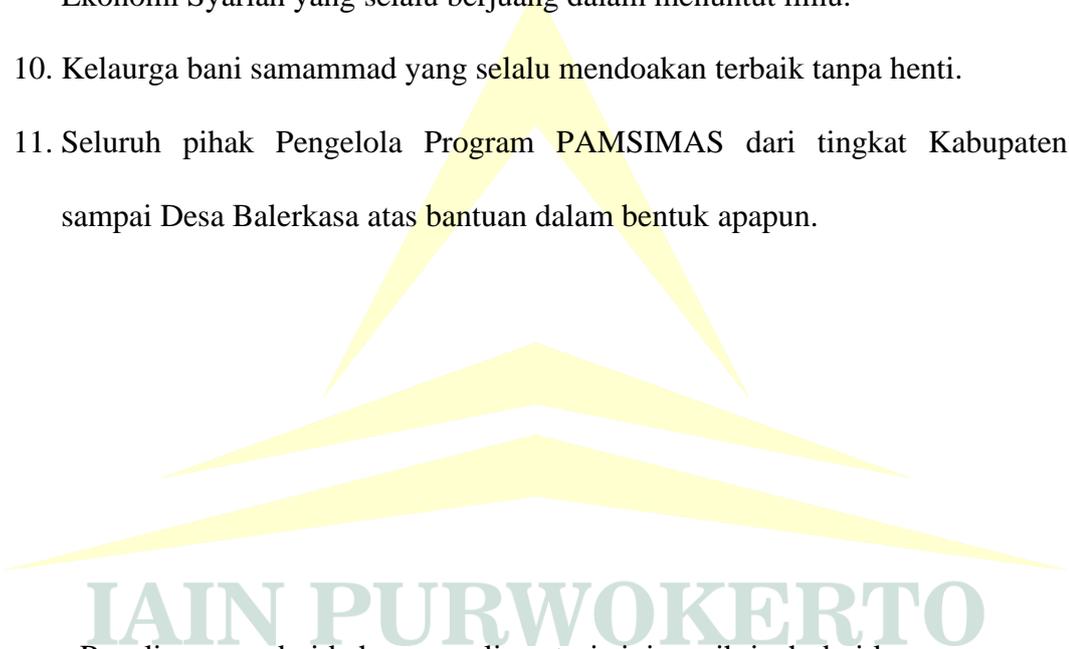
dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'at nya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat baik berupa sehat fisik maupun akan pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis sebagai tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) Pascasarjana Ekonomi Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto beserta Jajarannya.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag selaku ketua Prodi dan Dosen Pembimbing. Terimakasih atas semua masukan, kesabarannya dalam membimbing dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Staf Administrasi Pasca sarjana IAIN Purwokerto
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tuaku Bapak tuyatno dan ibu siswati yang selalu memberikan motivasi dan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Almamaterku Fakultas Pasca sarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
8. Kedua saudaraku Amanah Aida Quran dan Karom Amirutama yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaikku di pascasarjana IAIN Purwokerto Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu berjuang dalam menuntut ilmu.
10. Keluarga bani samammad yang selalu mendoakan terbaik tanpa henti.
11. Seluruh pihak Pengelola Program PAMSIMAS dari tingkat Kabupaten sampai Desa Balerkasa atas bantuan dalam bentuk apapun.



IAIN PURWOKERTO

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada tesis ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang

Purwokerto, 12 Februari 2021



Karomah Umiati

NIM. 1617611004



HALAMAN COVER.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO .....	xiii

PERSEMBAHAN .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Program PAMSIMAS .....	13
1. Pengertian Program PAMSIMAS .....	15
2. Tujuan Program PAMSIMAS .....	16
3. Landasan Hukum Program PAMSIMAS.....	19
4. Sasaran Program PAMSIMAS .....	19
5. Pendekatan Program PAMSIMAS .....	20
6. Prinsip Program PAMSIMAS .....	21
7. Komponen Program PAMSIMAS .....	23
8. Pendanaan Program PAMSIMAS.....	23
B. Maqashid Syariah .....	24
C. Pemberdayaan Masyarakat .....	34
D. Kesejahteraan .....	42
E. Masalah dan Nilai-nilai ekonomi islam .....	48
F. Hasil Penelitian yang relevan .....	52
G. Kerangka Berfikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	59
B. Tempat dan waktu penelitian .....	60
C. Data dan sumber penelitian .....	61

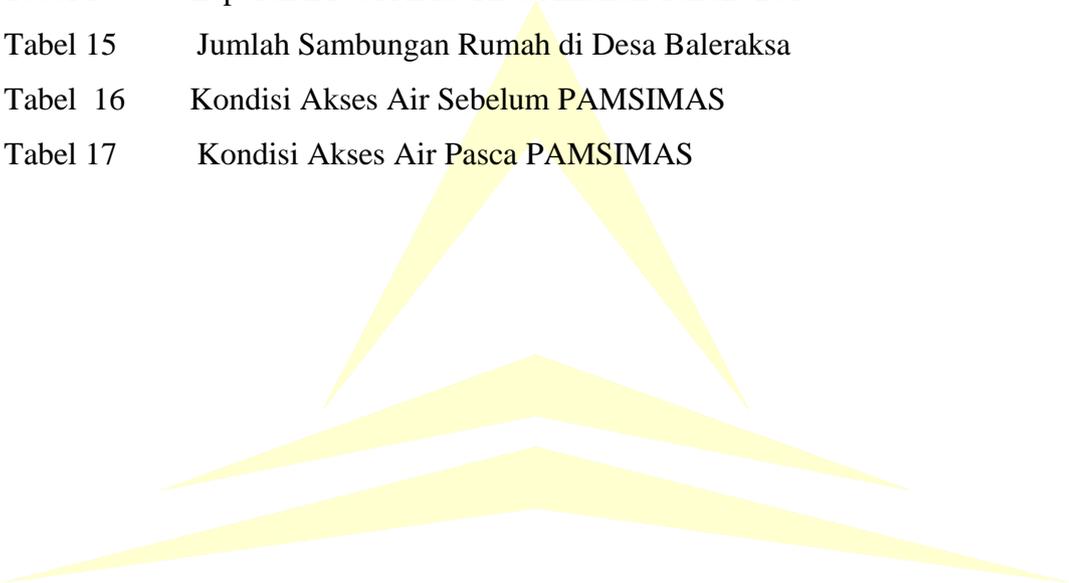
D. Teknik pengumpulan data .....	61
E. Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
1. Letak dan luas Wilayah .....	66
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	68
B. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Baleraksa .....	73
C. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Baleraksa Perspektif Masalah.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
C. Kelemahan Penelitian dan saran penelitian selanjutnya.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**SK PEMBIMBING TESIS**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Tabel 1	Indikator Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2015-2018
Tabel 2	Perkembangan Sambungan Rumah dan Pendapatan Program Pamsimas Di Desa Baleraksa
Tabel 3	Perbandingan Penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang
Tabel 4	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Tabel 5	Komposisi Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 6	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tabel 7	Komposisi Penduduk Berdasarkan Sosial Ekonomi
Tabel 8	Jumlah Prasarana dan Pengguna Air bersih
Tabel 9	Kriteria Sasaran Program
Tabel 10	Sasaran Program Pengembangan BP-SPAMS Tirta Amanah di Desa Baleraksa
Tabel11	Prinsip Program PAMSIMAS
Tabel12	Prosentase Akses Jamban di Desa Baleraksa
Tabel13	Laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2018
Tabel 14	Laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2019
Tabel 15	Jumlah Sumbangan Rumah di Desa Baleraksa
Tabel 16	Kondisi Akses Air Sebelum PAMSIMAS
Tabel 17	Kondisi Akses Air Pasca PAMSIMAS



## IAIN PURWOKERTO

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Perkembangan Ekonomi
Gambar 1.2	Indikator Kesejahteraan
Gambar 1.3	Alur Kerangka Berfikir
Gambar 1.4	Peta Desa Baleraksa



Lampiran 1.1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 1.2	Laporan RAT BP-SPAMS “TIRTA AMANAH” Tahun 2018-2019
Lampiran 1.3	Hasil Wawancara dengan pihak terkait program PAMSIMAS
Lampiran 1.4	Referensi buku Panduan program PAMSIMAS
Lampiran 1.5	Gambaran umum proses pelaksanaan program

PAMSIMAS di Desa Baleraksa dapat dilihat di yootobe



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Air sebagai komponen paling utama dan mendasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup. <sup>2</sup> Air minum dan sanitasi merupakan sektor infrastruktur

---

<sup>2</sup> Ilham Tegar Faza, Sri Suwitri, "Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum

yang penting dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 6 bahwa rakyat berhak atas air yang bersih, cukup, aman dan berkualitas.<sup>4</sup>

Ketersediaan air minum merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>5</sup> Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menyebabkan kebutuhan air minum semakin tinggi.<sup>6</sup> Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 267 juta jiwa yang kesemuanya berhak mendapatkan akses air minum. hal ini menunjukkan bahwa konsumsi air minum penduduk Indonesia perkapita semakin bertambah. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketersediaan air minum di pedesaan dengan dilaksanakannya Program PAMSIMAS.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program pembangunan nasional dimana pemerintah memiliki target Indonesia mampu menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, pembangunan layanan air minum saat ini tidak mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan air mulai menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, dimana pencapaian target penyediaan akses bagi seluruh rakyat membutuhkan usaha dan kerja keras dari pemerintah dalam melakukan pembangunan layanan air. Pemenuhan layanan di perdesaan menjadi prioritas dalam pembangunan. Salah satu program andalan pemerintah dalam

---

Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Tegal (Kajian Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2011)", hlm.2.

<sup>3</sup> Taufik Afriadi dan Hadi Wahyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan", 2012 Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>5</sup>[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/rispam/83\\_46\\_RISPAM-3303\\_a1695a.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rispam/83_46_RISPAM-3303_a1695a.pdf), diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Nurul Fitriyani dan Mardwi Rahdriawan "Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas Di Kecamatan Tembalang" Jurnal Pengembangan Kota (2015) ,Volume 3 No. 2 (80–89)

memenuhi kebutuhan layanan dasar yang tidak terlayani oleh sistem publik di perdesaan.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan layanan air minum di tingkat perdesaan menjadi masalah yang tidak hanya berkaitan dengan modal, melainkan kesadaran masyarakat dalam memelihara pembangunan sarana dan prasarana air minum. Dalam perkembangan pengelolaan BP-SPAMS di seluruh wilayah masih banyak ketidakberfungsian layanan air. Untuk itu pemilihan Desa sasaran harus memenuhi kriteria yang sudah di atur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2007. Hal ini dilakukan guna meminimalisir ketidakberfungsian layanan air minum di wilayah perdesaan.

Pemberdayaan menjadi salah satu pendekatan program dalam mengembangkan inisiatif masyarakat dalam mengelola sarana dan prasana sumber air bersih dan sanitasi yang telah dibangun perlu adanya sumber daya manusia yang mampu management agar kesehatan di lingkungan, sekolah dan masjid terlaksana dengan baik.<sup>7</sup> Hal ini dapat di pahami bahwa masyarakat menjadi tolak ukur keberlanjutan program layanan air minum.

Secara umum pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan dari pemerintah bersifat *Top Up*. Oleh karena itu, masyarakat tidak diberikan alternatif lain untuk menentukan pilihannya. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan.

Ketidak berfungsi Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak terlepas dari masalah pengelolaan, penanganan masalah yang timbul setelah pelaksanaan, pemahaman sumber daya manusia terkait dengan program, kesadaran masyarakat untuk memelihara layanan air minum serta minimnya modal. Untuk itu pembangunan layanan air minum dilaksanakan dengan pendekatan *Bottom Up*. Agar tujuan dari pembangunan yang berbasis masyarakat akan merubah kondisi ekonomi masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya sehingga kendala yang terjadi setelah pembangunan tidak memberikan ketidak berfungsi layanan air minum meskipun program

---

<sup>7</sup> Sri Nengsi," Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar", J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat ,Vol. 4, No. 1, (Mei 2018): 33

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketersediaan air minum di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan berdasarkan asas pemeliharaan, manfaat, seimbang, selaras, terbuka, terukur, berlanjut, adil.<sup>8</sup> Untuk itu masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pembangunan sampai dengan pengawasan. Hal ini dilakukan agar masyarakat menyadari pentingnya pembangunan berbasis masyarakat demi masa depan yang lebih baik.

Substansi, wujud al-maqāṣid asy-syarī'ah adalah kemaslahatan. Tujuan utama ketentuan syariat (maqāṣid syarī'ah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (hifz ad-dīn), (2) jiwanya (hifz annafs) dan (3) akal pikirannya (hifz al-ʿaql), (4) keturunannya (hifz an-nasl) dan (5) harta bendanya (hifz al-māl).<sup>9</sup> oleh karena itu terwujudnya maqashid syariah akan menciptakan masalah.

Masalah pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat menerapkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Hal ini dapat dipahami bahwa memelihara sumber air minum yang telah dibangun untuk tidak dieksploitasi masyarakat masa sekarang dengan mengorbankan generasi masa mendatang. Untuk itu pembangunan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan air dan tidak berlebih-lebih dalam menggunakannya. Pengelolaan yang dilaksanakan dengan tanggung jawab karena adanya rasa memiliki program akan berbeda dengan yang hanya mengikuti program pemerintah dengan aturan yang dituangkan dalam undang-undang dasar.

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

<sup>9</sup> Moh Nasuka, Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah, jurnal Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia, Vol. 6 No. 2 Oktober 2017

Dalam pandangan tauhid, semua aktivitas manusia harus mengikuti rambu-rambu syariat ketika menjalankan ekonomi islam dengan kaidah bahwa segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka seluruh aktivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku tidak membawa mafsadah (kerusakan bagi manusia). Masalah dapat terjaga dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam* dengan melindungi sumber air baku dari eksploitasi serta pengelolaan yang baik dan transparan. Hal ini dilakukan agar tujuan program tersebut tercapai.

Namun realitanya masih banyak infrastruktur yang di bangun dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, masih banyak yang tidak berfungsi secara optimal. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ketersediaan air bersih di musim kemarau.<sup>10</sup> Tentu saja ini menjadi problematika dalam pelaksanaan layanan air minum yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat.

Kebutuhan *dharuriyat* atau primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup umat manusia, saat kebutuhan akan sumber air bersih tidak terpenuhi akan memberikan dampak bagi kehidupan seperti penyakit diare, penyakit disentri, kesulitan dalam mengakses air bersih, kelangkaan air secara ekonomi.

Untuk mengatasi masalah kebutuhan air bersih, kemudian pemerintah mencanangkan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang dikenal dengan program PAMSIMAS dengan tujuan meningkatkan cakupan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi layak serta berkelanjutan. Hal ini diatur dalam undang-undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terkait layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya, tujuan dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemashlahatan manusia baik dunia maupun akhirat dengan cara menjaga lima

---

<sup>10</sup> <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/08/23/pdwsdx368-pamsimas-rusak-warga-purbalingga-kesulitan-air-bersih>, di akses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 09.00

unsur pokok kehidupan manusia yaitu agamanya, jiwanya, akal fikirannya, keturunannya dan harta bendanya. Untuk mewujudkannya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber air bersih agar lingkungan tidak tercemar serta eksploitasi sumber daya alam yang ada untuk memberikan kepuasan secara individual. Maka perlu adanya kesadaran akan pentingnya menerapkan hidup bersih dan sehat serta menggunaan sumber air sesuai kebutuhan tanpa berlebih-lebihan.

Sejalan dengan kemashlahatan dalam program penyediaan air minum aman dan sanitasi layak, dapat tercapai dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sama halnya dengan menjaga agama dengan menyediakan akses air bersih di setiap mushola, masjid maupun sekolah yang ada di Desa Baleraksa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ketersediaan air bersih memberikan kemudahan beribadah saat musim kemarau.

Pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat perlu memperhatikan lingkungan hidup yang berada di wilayah tersebut sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam untuk mendapatkan air bersih sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan menjaga jiwa dalam melestarikan lingkungan karena tingginya kerusakan lingkungan akan berdampak pada kematian

Strategi yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimana keterlibatan antara pengelola, pengguna dan pemerintah Desa bekerjasama untuk mengembangkan sumber air baku yang sudah dibangun dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Maka dari itu melindungi keturunan dengan cara pengelolaan sumber daya alam sebaik mungkin demi kebermanfaatan masa sekarang maupun masa depan.

Pengelolaan yang baik dalam program PAMSIMAS akan menjaga aset yang sudah diberikan untuk di pelihara sehingga layanan penyediaan air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Desa tersebut dan kontribusi peningkatan pendapatan Desa.

Program PAMSIMAS merupakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat tanpa mengabaikan akses air bersih di wilayah perkotaan dengan prinsip dari, oleh serta untuk masyarakat. Hal ini mengingat bahwa akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat belum mencapai 100% di semua wilayah yang ada di kabupaten Purbalingga terutama Desa Baleraksa yang sering kesulitan untuk memperoleh air bersih saat musim kemarau sehingga perlu percepatan dalam pembangunan sarana dan prasarana sumber baku demi tercapainya sasaran-sasaran program PAMSIMAS.

Sebagaimana telah diuraikan pengertian Maqasid al-Syariah dan juga urgensi pemeliharaan lingkungan maka didapatkan hasil bahwa menjaga lingkungan sama pentingnya dengan menjaga agama. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan dirusak berarti sama dengan berbuat dosa dan meniadakan tujuan Syariah. Sejalan dengan konsep Maqasid al-Syariah yang berdampak pada tidak tercapainya maslahat yang berarti merusak adh-Dharuriyyat. Disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 30-33 tentang Penciptaan Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi.<sup>11</sup>

Pada realitanya PAMSIMAS dibangun atas dasar kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang belum terpenuhi dengan tetap memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga kemaslahatan masyarakat dapat terwujud.

Kebutuhan akan air di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan infrastruktur seperti jaringan jalan yang menghubungkan wilayah lain di Jawa Tengah. Ketersediaan dan kebutuhan air menjadi berpacu dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah. Sedangkan volume ketersediaan sumber air di Kabupaten Purbalingga relatif tetap, sehingga perlu adanya pengaturan pemakaian air yang baik, agar potensi sumber daya air

---

<sup>11</sup>Tiara Khoerunisa, Pemeliharaan Lingkungan Berlandaskan Prinsip Maqashid Syariah Environmental Maintenance Based On The Sharia Maqashid Principles, Universitas Islam Bandung

yang ada dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan kontinuitas, kuantitas, dan kualitas dari sumber air baku yang digunakan untuk pelayanan air bersih pada kondisi saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat.<sup>12</sup> Berikut indikator kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2018 :

Tabel. 1 Indikator Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2015-2018

<b>Indikator/Indicators</b>				
Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih/ <i>Percentage of household have source of clean drinking water</i>	66,96	69,55	66,91	76,95
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak/ <i>Percentage of household have access of improved drinking water</i>	67,82	69,68	68,27	77,24
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak/ <i>Percentage of household have access to improved sanitation</i>	53,77	64,66	65,89	70,99

Dilihat dari tabel. 1 terkait dengan akses sumber air minum aman dan sanitasi layak setiap tahunnya meningkat jadi tujuan program pamsimas dianggap berhasil dimana layanan air bersih mencapai 76,95%, layanan air minum 77,24% dan sanitasi layak 70,99%. Untuk itu tahun 2019 di kabupaten purbalingga fokus pada pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi mencapai 100%.

Akses sanitasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 cakupan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 72,4 persen, sedangkan cakupan kepemilikan jamban baru mencapai 74,1 persen. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka memerlukan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan akses sanitasi masyarakat. Cakupan desa sOpen

<sup>12</sup>[http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/rispam/8346\\_RISPAM-3303\\_a1695a.pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rispam/8346_RISPAM-3303_a1695a.pdf), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2033

*Defecation Free* (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 baru mencapai 11 desa (4,6 persen).<sup>13</sup>

Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan selama 12 tahun dimulai pada tahun 2008- 2017 ada 140 desa dampingan yang sudah mengakses layanan air bersih sedangkan di tahun 2019 ada 16 desa yang menjadi sasaran program.<sup>14</sup>

Baleraksa merupakan salah satu desa penerima program pamsimas gelombang ke-3, tepatnya pada tahun 2016. Sebelum program Pamsimas masuk ke Desa Baleraksa, wilayah ini selalu mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Sehingga masyarakat setempat memilih untuk mandi, mencuci dan BAB di sungai. Hal tersebut merupakan perilaku hidup tidak sehat.

Kondisi ini lah yang memicu pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadikan Desa Baleraksa sebagai salah satu sasaran PAMISMAS untuk pelaksanaan program tahun 2017 dengan cara sosialisasi dalam rapat desa dengan semua lapisan masyarakat yang ada di desa baleraksa dimana desa baleraksa mengalami kesulitan dalam mengakses air minum aman dan sanitasi layak hampir mencapai 60% sehingga dibutuhkan sumber daya manusia dalam melaksanakan program pamsiams III dengan diberikan fasilitas sarana dan prasana untuk pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Desa Baleraksa awal mula sosialisasi PAMSIMAS masyarakat menolak adanya program tersebut dikarenakan masyarakat setempat berpendapat bahwa dengan adanya program tersebut di khawatirkan akan mengurangi debit air pada sumur warga.<sup>15</sup> Maka dari itu perwakilan dari pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi tentang program pamsiamas yang membutuhkan swadaya masyakat sebagai pendukung pelaksanaan program, karena program PAMSIMAS menjadi salah satu program nasional untuk mencegah stunting dengan disediakan air sebagai sarana dan prasarana.

---

<sup>13</sup>RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 BAB IV, <https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id/rpjmd/>, jam 14:22 wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Silah Sebagai Kepala bidang permukiman di Dinas Permukiman Kabupaten Purbalingga,

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ketua Satlak Program Pamsimas Desa Baleraksa

Sebagian masyarakat yang ada di desa baleraksa memberikan respon yang cukup baik dimana mereka suka rela memberikan hartabenda mereka untuk pembangunan desa dalam penyediaan air bersih di wilayah tersebut, yang hampir mencapai 14 juta dari 300 KK .<sup>16</sup> Pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari program PAMSIMAS yang mana masyarakat sebagai subjek. Berikut data perkembangan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa:

Tabel. 2 Perkembangan Sambungan Rumah dan Pendapatan Program Pamsimas Di Desa Baleraksa

Tahun	Pemakaian	Saluran Rumah	Pendapatan
2018	29,151 M <sup>3</sup>	309	Rp 5.042.750
2019	56,676 M <sup>3</sup>	510	Rp 10.066.000
2020	41,275 M <sup>3</sup>	535	Rp 10.000.000

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemakaian air, penggunaannya betul-betul memperhatikan kapasitas sumberdaya air yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya air. Adapun PAMSIMAS di Desa Baleraksa menyalurkan ke 32 saluran sosial seperti masjid, mushola dan juga TPQ agar kebutuhan air terpenuhi. Ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta benda. Begitu halnya iuran yang dibebankan pada pengguna digunakan untuk perbaikan saluran-saluran yang rusak, membiayai operasional pengurus PAMSIMAS dan sebagian untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES).

Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa sudah berjalan selama 3 tahun (2017-2020). Adapun dalam perkembangannya muncul berbagai masalah diantaranya yaitu masih kurangnya jaringan, belum adanya Bak Pelepas Tekan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Satlak Program Pamsimas Desa Baleraksa

(BPT) yang mengakibatkan meteran, stop kran dan pipa bocor, kurangnya bak penampung, dan belum adanya sistem aplikasi pembayaran air yang memadai. Jumlah pemakai fasilitas PAMSIMAS mencapai 535 sambungan rumah (SR). Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui Program PAMSIMAS dalam Perspektif masalah di Desa Baleraksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dalam perspektif masalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
2. Untuk menganalisis program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam mewujudkan masalah di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam kaitannya memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dalam menjaga agama, akal, keturunan, jiwa dan harta melalui pembangunan sarana prasarana sumber air bersih berbasis masyarakat untuk mencapai kemashalatan.

## 2) Secara Praktis

Manfaat untuk pihak-pihak terkait, misal:

### a. Masyarakat desa lokasi penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat mengedukasi masyarakat Desa Baleraksa pada umumnya dan pengguna PAMSIMAS khususnya untuk lebih menjaga sumber daya air dan tidak mengeksploitasinya demi keberlanjutan program PAMSIMAS sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah untuk mencapai masalah.

### b. Pemerintah

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat dan pelaksana program PAMSIMAS baik pemerintah maupun institusi terkait, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Purbalingga dalam memperhatikan aspek-aspek penting agar program tersebut benar-benar dapat meningkatkan kemandirian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan memberikan masalah.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan tesis ini adalah:

### Bab 1 pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian ini dilakukan sehingga menunculkan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian tesis ini. Untuk melakukan penelitian ini terdapat ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini.

### Bab 2 landasan teori

Pada bab ini dijelaskan landasan teori yang mendasari penelitian ini. Acuan teori diambil baik dari literatur, jurnal dan *study report* yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab 3 metode penelitian

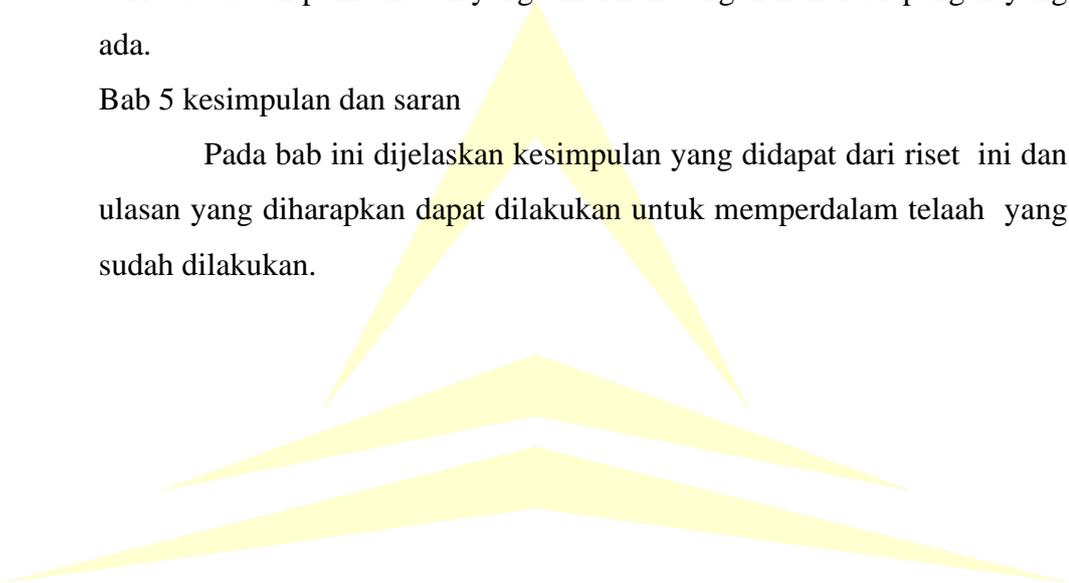
Pada bab ini dijelaskan mengenai pemilihan metode evaluasi untuk penelitian ini, pembuatan model penelitian, pengumpulan data dan alur penelitian yang dilakukan.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini dijelaskan data yang didapatkan, hasil pengolahan dari survei dan pembahasan yang dikaitkan dengan kondisi lapangan yang ada.

Bab 5 kesimpulan dan saran

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan yang didapat dari riset ini dan ulasan yang diharapkan dapat dilakukan untuk memperdalam telaah yang sudah dilakukan.



**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**A. Program PAMSIMAS**

**1. Pengertian Program PAMSIMAS**

Program PAMSIMAS merupakan perwujudan dari amanat RPJPN 2005-2025 dan RPJM 2015-2019 melalui program pembangunan nasional “Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019”. Target pemerintah tahun 2019 kebutuhan air bersih dan sanitasi

terpenuhi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS adalah satu program pemerintah untuk dapat menyediakan layanan air bersih dan sanitasi yang layak.

Program Pamsimas adalah salah satu program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, program PAMSIMAS dilakukan melalui kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa dan komunitas.<sup>18</sup>

PAMSIMAS merupakan program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program PAMSIMAS harus dilandaskan atas partisipasi masyarakat yang tinggi dan pelaksanaannya pun harus terorganisir sehingga tujuan dari program dapat dicapai secara optimal.

Partisipasi masyarakat yang tinggi didorong oleh rasa bahwa mereka sangat membutuhkan air, sedangkan ketersediaan air yang ada tidak mencukupi. Hal ini harus dibangun agar program PAMSIMAS dapat berkelanjutan.<sup>19</sup> Maka kemudian pemerintah perlu memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan dan pengelolaan dari program PAMSIMAS. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dari program PAMSIMAS dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki,

---

<sup>17</sup> Andreas Suhono, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat Program PAMSIMAS, PT-3*, (Jakarta;2016), hlm. i.

<sup>18</sup> Andreas Suhono, *ProgramPAHSIHAS, P-1*(Jakarta;2016), hlm. 4.

<sup>19</sup> Andreas Suhono, *ProgramPAHSIHAS,....*hlm. VIII.

kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat Desa<sup>20</sup> untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.<sup>21</sup>

Program Pamsimas mendorong sinergi program air minum dan sanitasi perdesaan melalui berbagai pendanaan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan. Oleh karena itu pendanaan tidak hanya dari APBD<sup>22</sup>, APBN<sup>23</sup> atau Dana Desa<sup>24</sup> saja melainkan juga ada swadaya dari masyarakat baik itu berupa uang dan juga material yang dibutuhkan.<sup>25</sup>

Pamsimas merupakan program yang bersifat hibah atau bantuan, sehingga perlu adanya penanganan pasca program agar hasil pembangunan tidak sia-sia. Untuk menjamin keberlanjutan program, maka diperlukan adanya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I ketentuan Umum pasal 1 hlm. 4.

<sup>21</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*, ...hlm. VIII.

<sup>22</sup> APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 16.

<sup>23</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1, hlm. 3.

<sup>24</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2010 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, BAB I ketentuan umum pasal 1, hlm. 4.

<sup>25</sup> Andreas Suhono, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan*, ...hlm.4.

program seperti manfaat, pengelolaan dan cara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terus melaksanakan program. Dengan adanya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap program Pamsimas maka diharapkan program Pamsimas mengalami keberlanjutan.<sup>26</sup>

Program PAMSIMAS merupakan kebijakan nasional dalam pembangunan air minum yang menggariskan bahwa tujuan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum.<sup>27</sup>

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target *Universal Access 2019*.<sup>28</sup>

## **2. Tujuan Program PAMSIMAS**

Pembangunan Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang berkelanjutan

---

<sup>26</sup> Ardianto Adhi Nugroho dan Maryono, dalam jurnal berjudul *Peluang Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (PAMSIMAS) Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 2016

<sup>27</sup> Abdul Kholiq, dalam jurnal berjudul *Evaluasi Keberhasilan Program Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes*, Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, Volume 20, No 2, Desember 2014

<sup>28</sup> Sri Nengsi, dalam jurnal yang berjudul *Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, Mei 2018, p-ISSN: 2442-8884 / e-ISSN: 2541-4542

- b. Meningkatnya akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban.
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. Meningkatkan penerapapan perilaku stop buang air besar sembarangan
- e. Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
- f. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan kelestarian sumber daya alam sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang
- g. Penguatan dalam kelembagaan pengelolaan PAMSIMAS menjamin keberlanjutan program<sup>29</sup>

Keseluruhan tujuan program PAMSIMAS dapat terwujud dengan partisipasi aktif masyarakat dan peran serta pemerintah untuk mendorong percepatan tujuan program.

### **3. Landasan Hukum Program PAMSIMAS**

Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN]<sup>30</sup> 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi<sup>31</sup> dapat dinikmati oleh

---

<sup>29</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....hlm. 5.

<sup>30</sup> Rencana pembangunan jangka pajang nasional tahun 2005-2025 yang selanjutnya sebagai RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pemangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 pada BAB I ketentuan umum pasal 1, hlm.2.

<sup>31</sup> Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi pada BAB I ketentuan umum pasa 1 ayat 4, hlm.3.

seluruh rakyat Indonesia. Beberapa payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pamsimas antara lain:<sup>32</sup>

<b>Landasan Hukum</b>	<b>Tentang</b>
• UU No. 17 Tahun 2007	RPJPN 2005-2025
• UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial <sup>33</sup>
• UU No. 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan <sup>34</sup>
• UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah <sup>35</sup>
• UU No. 6 Tahun 2014	Desa <sup>36</sup>
• UU No. 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara <sup>37</sup>
• Perpu No. 2 Tahun 2014	Perubahan atas UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah <sup>38</sup>

<sup>32</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*, .... hlm. 22.

<sup>33</sup> Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada BAB I ketentuan umum pasal 1, hlm.2.

<sup>34</sup> Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada BAB I ketentuan umum pasal 1, hlm.2.

<sup>35</sup> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada ketentuan umum pasal 1, hlm.2.

<sup>36</sup> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarssa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, hlm.2.

<sup>37</sup> Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD dalam Undang-undang Republik Indoensia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada BAB I ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1, hlm.2.

<sup>38</sup> Perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD provinsi dan PRD kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dalam Peraturan pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

• Perpres No. 5 Tahun 2015	RPJMN Tahun 2015-2019 <sup>39</sup>
• Perpres No. 185 Tahun 2014	Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
• Perpres No. 10 Tahun 2010	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan <sup>40</sup>
• PP No. 122 Tahun 2015	Sistem Penyediaan Air Minum <sup>41</sup>
• PP No. 34 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa yang bersumber dari APBN
• PP No. 69 Tahun 2014	Hak Guna Air <sup>42</sup>
• PP No. 45 Tahun 2013	Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Permendagri No. 21/2011	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah <sup>43</sup>
• Permenkes No. 3/2014	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) <sup>44</sup>

<sup>39</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 pada memutuskan menetapkan pasal 1 ayat 1, hlm.2.

<sup>40</sup> Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pada BAB IV TIM Nasional percepatan penanggulangan Kemiskinan Bagian Kesatu Umum Pasal 6 ayat 1, hlm.4.

<sup>41</sup> Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 4, hlm. 2.

<sup>42</sup> Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 69 tahun 2014 tentang hak guna air pada BAB I ketentuan umum pasal 1, hlm.1.

<sup>43</sup> Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah., dalam peraturan meteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan materi dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 1, hlm..4.

<sup>44</sup> Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dalam peraturan meteri kesehatan republik Indonnesia nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat pada BAB I ketentuan umum pasal , hlm..3.

• Permenkeu No. 168/PMK.05/2015	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
• Permenkeu No. 143/PMK.02/2015	Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan DIPA
• Permenkeu No. 190/PMK.02/2012	Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berdasarkan Perpres No. 185 Tahun 2014, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.<sup>45</sup>

#### **4. Sasaran Program PAMSIMAS**

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum<sup>46</sup> aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa

<sup>45</sup> Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

<sup>46</sup> Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber air air di BAB I ketentuan umum pasal satu ayat 5, hlm. 2.

sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

<sup>47</sup>Target desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000 desa peserta Pamsimas. Secara umum, kriteria desa sasaran baru Pamsimas meliputi:

- a) Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas
- b) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%
- c) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%
- d) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
- e) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien. (secara nasional, rata-rata biaya per penerima manfaat adalah sebesar Rp 350 ribu/Jiwa)
- f) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa<sup>48</sup>
- g) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
  - Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL)

---

<sup>47</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*, ....hlm.15.

<sup>48</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dalam peraturan pemerintah republik indoneisa nomor 47 tahun 2015 tentang perubahann atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1,hlm.3.

- Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura (in-kind)
- Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).<sup>49</sup>

## 5. Pendekatan Program PAMSIMAS

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan Program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut:

- a) Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis TUPOKSI, artinya Program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan tupoksi masing-masing
- b) Peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi;
- c) Berbasis Masyarakat; artinya Program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.<sup>50</sup>

## 6. Prinsip Program PAMSIMAS

Prinsip yang diterapkan dalam Program Pamsimas adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm. 14.

<sup>50</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm. VIII.

- a. Tanggap Kebutuhan - Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat<sup>51</sup>
- b. Partisipatif - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program Pamsimas<sup>52</sup>
- c. Kesetaraan Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi<sup>53</sup>
- d. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman<sup>54</sup>
- e. Akses bagi Semua Masyarakat - Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan<sup>55</sup>
- f. Perlindungan pada Anak - Program Pamsimas memastikan bahwa pelayanan yang air dan sanitasi yang dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak;<sup>56</sup>
- g. Keberlanjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus

---

<sup>51</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, .... Hlm.10.

<sup>52</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm.18.

<sup>53</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, .... Hlm.10.

<sup>54</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm.18.

<sup>55</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, .... Hlm.10.

<sup>56</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm.18.

diciptakan bersama oleh para pelaku Program Pamsimas sejak awal pelaksanaan;<sup>57</sup>

- h. Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
- i. Berbasis Nilai - Program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.<sup>58</sup>

## **7. Komponen Program PAMSIMAS**

- a) Komponen 1: Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah dan desa
- b) Komponen 2: Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat
- c) Komponen 3: Penyediaan sarana air minum dan sanitasi
- d) Komponen 4: Hibah insentif
- e) Komponen 5: Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program<sup>59</sup>

## **8. Pendanaan Program PAMSIMAS**

Keberhasilan pencapaian tujuan suatu program dapat dilihat dari sisi pengelolaannya. Pengelolaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban baik kepada pemerintah Indonesia maupun kepada donor. Program ini merupakan program

---

<sup>57</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, .... Hlm.10.

<sup>58</sup> Andreas Suhono, *Program PAHSIHAS*,....Hlm.18.

<sup>59</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas*, P-1 edisi 2013 (Jakarta:2013), hlm. 2.

pemerintah maka pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, akuntabel, efisien, terpadu, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memujudkan pemerintahan yang baik (good governance).<sup>60</sup>

UU No. 17 tahun 2004 dan PP No. 21 Pasal 7 tahun 2004 menyatakan bahwa kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang harus mencerminkan suatu output yang terukur.

Alokasi dana, PAMSIMAS yang dibiayai dari Kredit IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) No 8259-ID pada dasarnya terbagi atas 2 bagian, yaitu :

- a) Alokasi untuk Hibah Desa, bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan PAMSIMAS pada sarana air minum dan sanitasi serta kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
- b) Alokasi Non Hibah Desa, bantuan dana diluar hibah desa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Dana ini meliputi, pengadaan barang, lokakarya dan pelatihan, serta Jasa Konsultan maupun Jasa Non Konsultan.

## **B. Maqashid Syariah**

Konsep maqashid syariah memiliki posisi yang sangat diutamakan dalam pembahasan mengenai tujuan penetapan hukum islam.<sup>61</sup> Jadi mengatasi permasalahan yang muncul disetiap zaman berpedoman pada al-quran dan hadist serta sumber hukum lainnya untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara.

---

<sup>60</sup> Danny Sutjiono, *Pedoman Umum Pengelolaan*,...Hlm. 20.

<sup>61</sup> Miskari, " Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah", *Al-Mashlahah*, Volume 14 Nomor 1 April 2018;117

Jaber sudah mengutip pendapatnya Abraham Maslow bahwa kebutuhan manusia sangat kompleks.<sup>62</sup> Maka sebagai seorang khalifah di muka bumi ini dalam memenuhi semua kebutuhan dasar umat manusia perlu pengelolaan sumber daya tidak terlalu berlebihan untuk menjaga kualitas.

Menurut As-Syatibi Maqashid syariah di bagi menjadi tiga bagian yaitu dharuriyat, tahsiniyat, hajiat. Menjaga kebutuhan yang bersifat dharuriyat akan mengurangi kadar kerusakan dan memaksimalkan kebermanfaatan kebutuhan hajiyat menghilangkan kesulitan dari kehidupan mukalaf dan tahsiniyat sebagai penyempurna kebutuhan sebelumnya untuk meningkatkan akhlak dan adat istiadat.<sup>63</sup> Islam memberikan tuntunan untuk manusia di muka bumi ini, dimana dalam memenuhi kebutuhan hidup ada proses tahapan dari dasar hingga sempurna.

Menurut Ar-Raisuni maqashid syariah di definisikan sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemashlahatan hamba. Sedangkan menurut Wahab Az-Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah sebagai makna-makna yang mengarahkan pada tujuan yang ditetapkan syariah. Maka sasaran dari kebijakan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di sebuah negara.<sup>64</sup> Dari definisi maqashid syariah diatas menyimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan aturan yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat sesuai dengan sasaran dan mencapai tujuan demi kemashlahatan umat manusia.

Dalam teori klasik secara hirarki Maqashid syariah terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: Primer (الضرورية), kebutuhan (الحاجية), dan tersier (التحسينية). Secara sederhana, maqashid syariah, juga dapat di bagi menjadi

---

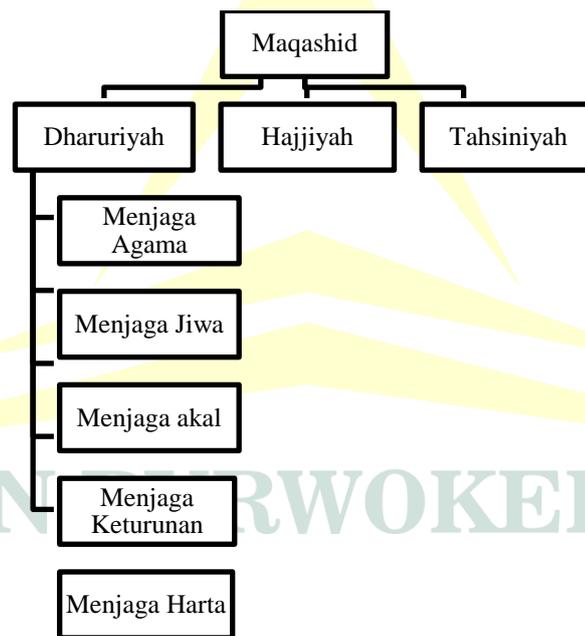
<sup>62</sup> Miskari, "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah ...hlm.118.

<sup>63</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, ;35

<sup>64</sup> Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publing, 2019). 17-21.

mashlahah daruriyyah (مصلحة الضرورية) dan gairu daruriyyah (الضرورية غير مصلحة) dengan essensi yang sama.

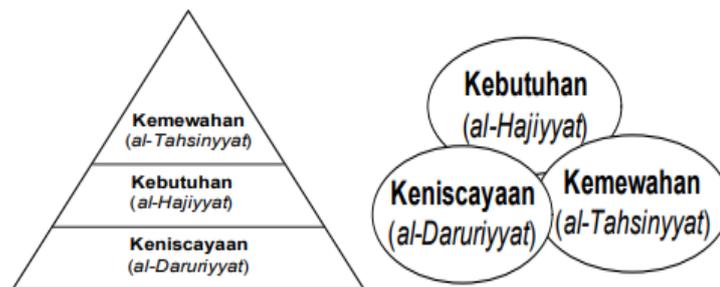
Dharuriyyah merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang esensi dan inti, yang apabila tidak terpenuhi menjadi hilang eksistensi manusiawinya. Daruriyyah dibagi menjadi 5 (lima) kebutuhan dasar, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Hajjiyyah adalah kebutuhan yang menunjang eksistensi daaruriyyah yang sifatnya penting seperti: persamaan, keadilan, dan kemerdekaan. Sedangkan tahsiniyyah adalah kebutuhan selain primer dan sekunder, yang perlu diwujudkan dan dipelihara untuk kesempurnaan hidup manusia.



Gambar 1.4: *Skema maqashid syari'ah ditinjau dari perspektif Keniscayaan*

Dalam implementasinya kebutuhan dharuriyah lebih didahulukan daripada hajjiyah dan tahsiniyah sesuai dengan tingkatannya. Hukum ini tidak berubah kecuali jika dihadapkan pada persoalan lain yang sifat dharuriyyahnya lebih tinggi, seperti memelihara agama. Jiwa dapat dikorbankan demi memelihara agama, dengan kata lain dalam

implementasinya, jika didapat hal-hal yang kontradiktif, maka dharuriyyah harus didahulukan dari hajjiyah dan tahsiniyyah, dan hajjiyah harus didahulukan dari tahsiniyyah. Walaupun maqashid disusun secara hirarkhis sesuai dengan kriteria masing-masing, pada faktanya masih terjadi hubungan keterkaitan bahkan persimpangan di antara ketiganya, sebagaimana dapat dipahami pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.5: *Maqashid dilihat dari Hierarki, Persimpangan, dan Keterkaitan antar maqashid*

Pada gambar di atas, bahwa setiap dimensi maqashid memiliki domain dan wilayah sendiri, namun terjadi hubungan interdependensi dan interkoneksi antara satu dengan yang lain, seperti: agama sebagai prioritas tertinggi tidak akan terwujud tanpa keberadaan jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>65</sup>

Pembangunan dan pengelolaan program PAMSIMAS betul-betul memperhatikan kapasitas sumberdaya air yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta benda. Lima hal tersebut harus dijaga dan di lindungi sebagai berikut:

### 1. Menjaga Agama (al-Din)

<sup>65</sup> Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018) DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045, Volume 20, Number 2 (2018).

Pada dasarnya syariat islam diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama yang masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya<sup>66</sup>. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

﴿لَا يُكْرَهُ عَلَيْكَ لِغَيْرِكَ﴾

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam)*<sup>67</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwa islam memberikan kebebasan dalam meyakini sang pencipta yaitu Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, makhluk hidup serta sumber daya alam untuk dapat di kelola oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi demi keberlangsungan hidup umat manusia tanpa merugikan yang lainnya.

﴿وَلَا يَكْرَهُ اللَّهُ إِذَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ إِذَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

Artinya: *Dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.*<sup>68</sup>

IAIN PURWOKERTO

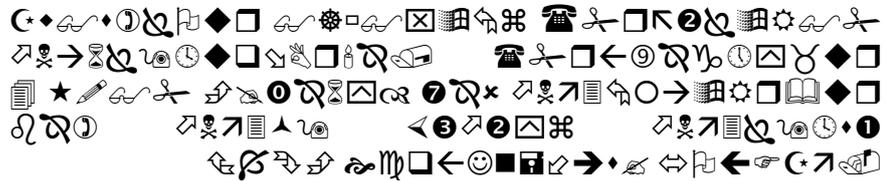
Kemashlahatan sebagai seorang muslim di dunia dapat direalisasikan dengan hubungan baik manusia dengan tuhanNya. Hal ini dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban-Nya seperti mengucapkan kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan naik haji bila mampu serta ibadah hubungannya dengan manusia. Keimanan kepada Allah serta hal-hal yang berhubungan dengan ibadah serta hukum-hukum dan undang-undang yang telah

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 58.

<sup>67</sup> Lihat di QS al-Baqarah ayat; 256

<sup>68</sup> Lihat QS Al-Hajj ayat :40

disyari'atkan oleh Allah SWT dijamin secara hukum.<sup>69</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam al-quran dibawah ini:



Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>70</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit tetap berusaha menuju jalan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan maqshid syariah dalam meningkatkan taraf hidup dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan tersebut sangat mendasar untuk kelangsungan hidup agar dapat merealisasikan mashlahah di dunia maupun akhirat.

Prinsip agama terancam ka rena air yang digunakan untuk bersuci atau berwudhu tidak layak untuk digunakan bersuci karena memiliki potensi justru mendatangkan mudharat akibat berwudhu menggunakan air yang dapat mendatangkan penyakit.<sup>71</sup>

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama.

## 2. Melindungi Nyawa (al-Nafs)

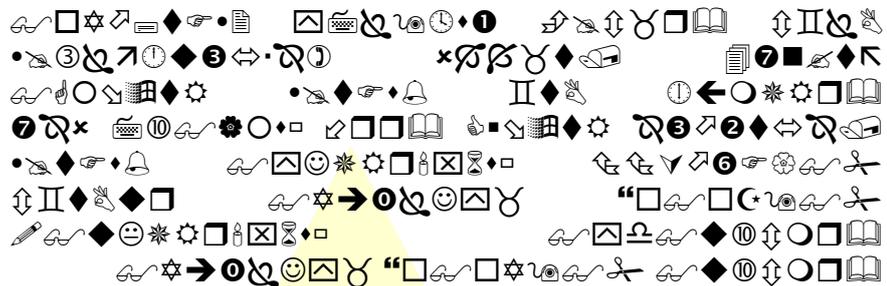
Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau

<sup>69</sup> Zelfeni wimra,” Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Januari 2017, edisi 6, hlm. 23

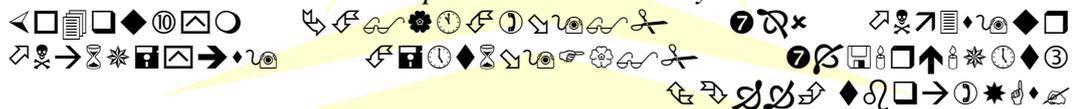
<sup>70</sup> Lihat QS At-Taubah ayat:41

<sup>71</sup> <https://republika.co.id/amp/n99a472>,”Kepemilikan Sumber Daya Air dan Maqashid Syariah”, 21/01/2021 Pukul 20.04 WIB.

orang jahat sekali pun.<sup>72</sup>Oleh karenanya, Allah mensyariatkan qishash bagi orang yang membunuh. Di samping itu, juga ada jaminan terhadap kemuliaan kehidupan manusia seperti bebas beramal dan berfikir serta menyampaikan pendapat dan pikiran.<sup>73</sup> Landasan hukum yang menjelaskan pentingnya menjaga jiwa bagi semua umat manusia yang ada di dunia untuk keberlangsungan hidup adalsah sebagai berikut:



*Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*<sup>74</sup>



*Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*<sup>75</sup>

## IAIN PURWOKERTO

Unsur maqashid syari'ah yang berupa hifdzu nafs (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Semakin tinggi eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada maka akan semakin tinggi pula angka kematian yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup akibat keserakahan manusia.

<sup>72</sup> Ahmad sarwat, *Maqashid Syariah...*hlm. 59.

<sup>73</sup> Zelfeni wimra, " Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Januari 2017, edisi 6, hlm. 22

<sup>74</sup> Lihat Qs al-Maidah ayat 32

<sup>75</sup> Lihat QS Al-Baqarah ayat 179

### 3. Melindungi Akal (al-Aql)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.<sup>76</sup>



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"<sup>77</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwa melindungi akal dengan minum air yang tidak membahayakan diri sendiri adalah salah satu ciri orang berakal sehingga menghindari minuman yang tidak memberikan manfaat bagi kesehatannya dalam jangka panjang maupun pendek.

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha itu adalah perbuatan yang baik yang disuruh Allah. Seperti mencapai ilmu tanpa batas. Sebagai sabda nabi yang populer:

IAIN PURWOKERTO

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya Menuntut ilmu itu adalah wajib setiap orang yang beriman

Berdasarkan ayat diatas bahwa sumber daya manusia yang ada di muka bumi memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu sebagai seorang khalifah yang di ciptakan untuk memberikan manfaat atas apa yang dipelajari pada sebagian manusia lainnya.

Prinsip akal akan terkena dam pak dengan diawali tidak memiliki jiwa yang sehat. Prinsip jiwa yang tidak terpenuhi

<sup>76</sup> Ahmad sarwat, *Maqashid Syariah...*hlm.60.

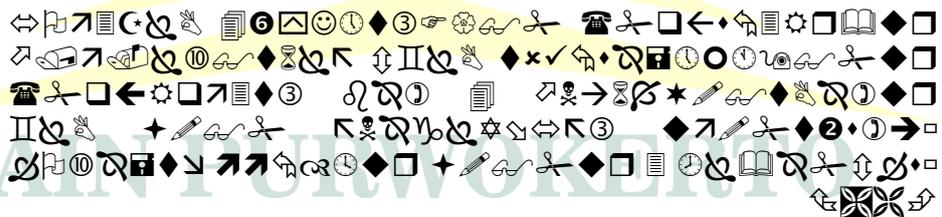
<sup>77</sup> Lihat QS Al-Baqarah ayat 219

mengakibatkan prinsip akal yang tidak terpenuhi karena akal yang sehat tidak akan optimal bila tidak memiliki jiwa yang sehat.<sup>78</sup> Oleh karena itu kualitas sumber air yang baik akan memberikan dampak positif pada akal yang lebih optimal.

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

#### 4. Melindungi Keluarga/garis keturunan (al-Ird)

Allah SWT. melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong melakukan hubungan kelamin yang dilakukan dengan cara yang sah adalah perbuatan baik. Dalam hal ini Allah mansyari'atkan kawin dan berketurunan,<sup>79</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32:



*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

<sup>78</sup> <https://republika.co.id/amp/n99a472>,"Kepemilikan Sumber Daya Air Dan Maqashid Syariah", 21/01/2021 Pukul 20.04 WIB.

<sup>79</sup> Zelfeni wimra," Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Januari 2017, edisi 6, hlm. 23

Dengan demikian, usaha merusak keturunan yang sah adalah perbuatan buruk yang tidak dibenarkan dalam syariah. Nabi Muhammad, Saw.juga melarang sifat tabattul (membujang) karena mengarah kepada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial menghaburkan keturunan serta akan mendatangkan bencana.<sup>80</sup>

Prinsip keturunan terancam karena keturunan atau calon keturunan dari masyarakat mengalami kekurangan air ataupun kekeruhan air.<sup>81</sup>

Arti menjaga diri (hifzh al-nafs) bukan hanya berorientasi masa kini, tetapi juga masa depan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kemaslahatan dan mafsadat haruslah mempertimbangkan kehidupan generasi mendatang, karena meninggalkan generasi yang lemah dilarang, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 9. Kedua, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek menjaga dan merawat keberlangsungan serta kemaslahatan alam, tumbuhan, dan binatang.

##### **5. Melindungi Harta (al-Mal)**

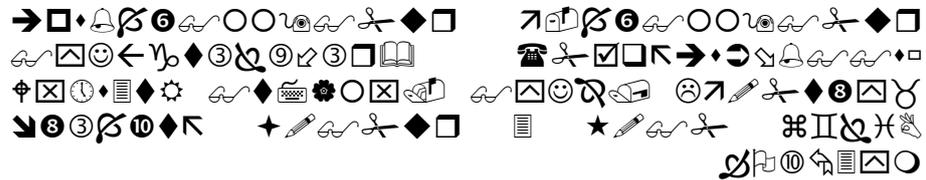
Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, dan pakaian demi mempertahankan kehidupannya. Mencapai ini, manusia harus berupaya untuk mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh syara'. Sedangkan usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan harta adalah perbuatan yang buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri,

---

<sup>80</sup> Zelfeni wimra," Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Januari 2017, edisi 6, hlm. 23

<sup>81</sup> <https://republika.co.id/amp/n99a472>,"Kepemilikan Sumber Daya Air Dan Maqashid Syariah", 21/01/2021 Pukul 20.04 WIB.

dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan<sup>82</sup> seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:



*Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.<sup>83</sup>

Dalam pemanfaatan alam dan lingkungan hidup yang dapat mengancam keberlangsungan jiwa manusia tidak dibenarkan. Sesuai kaidah Ushul Fiqh: “Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala al-jalb al-mashalih (menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).Terjadinya kerusakan alam dan kerakusan umat manusia tak lain adalah karena tidak adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang alam, tumbuhan, dan binatang serta fungsi-fungsinya. Islam mengajarkan hidup kebersahajaan. Manusia sebenarnya tak perlu rakus dan menjadi konsumerisme dalam menjalani hidup. Dengan kesadaran ini, maka alam dan seluruh isinya selainnya diposisikan sebagi subjek yang kedudukannya setara dengan kedudukan manusia, karena kerusakan alam pada akhirnya

<sup>82</sup> Zelfeni wimra,” Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Januari 2017, edisi 6, hlm. 22

<sup>83</sup> Muhammad Ramadhan,”Maqasid Syari’ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)”, Analytica Islamica: Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2019.

juga akan berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.<sup>84</sup>

### C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki kata dasar “daya” yang artinya “kekuatan” dan istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*” jadi pemberdayaan artinya memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya juga pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu *Powerless* merupakan tanggungjawab pemerintah, namun masyarakat dapat memberikan dukungannya dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Menurut Saleebey (1992:45) dalam penjelasannya yang dikutip dari Cornell University Empowerment Group bahwasanya pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan pada komunitas lokal.<sup>85</sup> Hal ini dilakukan untuk adanya rasa memiliki dalam akses sumber tersebut.

Kartasmita (1996:144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.<sup>86</sup> Potensi masyarakat berkembang saat kondisi tidak berdaya karena kesulitan akses air bersih dengan dibangunnya sumber baku untuk memenuhi kebutuhan air saat kemarau.

---

<sup>84</sup> Ahmad Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Fakultas Sains dan Teknologi", UIN Sultan Syarif Kasim Riau ISSN (Online) : 2579-5406 Pekanbaru, 18-19 Mei 2017.

<sup>85</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAS PRESS, 2016), hlm. 55.

<sup>86</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,... hlm. 53

Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.<sup>87</sup> Konsep pembangunan ekonomi yang menerapkan nilai-nilai sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencerminkan sudut pandang yang baru mengenai pembangunan yang bersifat *People –Centered, Participatory, Empowering and Sustainable*".<sup>88</sup> Maka dari itu pemberdayaan sangat berkaitan erat dengan peran penting manusia sebagai subjek sehingga masyarakat ikut serta dalam proses *Planning, Organising, Controlling, Actuating* untuk keberhasilan pembangunan.

Istilah Empowerment merupakan hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi kata kunci pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>89</sup> Dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik harus memiliki pedoman sesuai dengan tujuan dari pembangunan agar terwujud kesejahteraan, kemandirian, etika dan keadilan.<sup>90</sup>

Mardikanto dan Soebiato mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup. Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/up grade utilitas dari objek yang diberdayakan.

---

<sup>87</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018), hlm.18

<sup>88</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabet, 2017), hlm. 51.

<sup>89</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm. 25

<sup>90</sup> Raharjo Adisasmita, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015), hlm 51.

Kondisi ketidakberdayaan masyarakat di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, sosial budaya, geografi dan lingkungan serta personal dan fisik.<sup>91</sup>

Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual tetapi kolektif.<sup>92</sup> Hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat menjadi adanya ketergantungan pada program atau bantuan.

Pada upaya pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli pada masyarakat, paling tidak harus memuat lima hal pokok yaitu, adanya stimulan, peningkatan SDM, pembangunan prasarana dan pembangunan/pengembangan kelembagaan perdesaan.<sup>93</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep baru, yang mana masyarakat tidak lagi dijadikan objek pembangunan tetapi subjek dari pembangunan itu sendiri.<sup>94</sup> Dalam konteks pembangunan berkeadilan, tumbuh dengan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Hal ini sejalan dengan rancangan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin seperti makanan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan.<sup>95</sup>

Robert Chambers seorang ahli yang pemikiran dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *People Centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *Empowering* (memberdayakan) And *Sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih

---

<sup>91</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,... hlm. 55-56.

<sup>92</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,...hlm. 58.

<sup>93</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,...hlm. 58.

<sup>94</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,...hlm. 45.

<sup>95</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilyah, dan Pembangunan*,...hlm. 46.

lanjut (*Safety Net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.

Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Suharto pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>96</sup>

Menurut Samuel Paul Partisipasi aktif dinyatakan sebagai berikut: *“Participation refers to an active process where by beneficiaries influence the direction and execution of devolopment project rather than merely receissve a share of project benefits”* (Pelaksanaan proyek pembangunan akan dipengaruhi oleh keaktifan kelompok)<sup>97</sup> maka dari

---

<sup>96</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018), hlm.19

<sup>97</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Kerakyatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sketor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 27-28.

itu kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan layanan air minum sangatlah penting melibatkan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat mulai sadar akan kondisi atau situasi yang terjadi dan permasalahan yang muncul. Sehingga masyarakat berupaya mengatasi permasalahan yang ada dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.<sup>98</sup>

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan<sup>99</sup> sehingga menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian tidak hanya dari segi ekonomi melainkan semua aspek.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal. Hal ini dilakukan untuk mengenal konsep kelompok lemah serta penyebab ketidakberdayaan yang dialami.<sup>100</sup>

Kategori kelompok lemah atau tidak berdaya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonominya rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/ tidak adil dan diskriminasi. Kategori ini sejalan dengan sasaran yang akan dijadikan program PAMSIMAS dimana pembangunan sumber air di wilayah tersebut akan mempermudah masyarakat yang tidak berdaya secara struktural.

---

<sup>98</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Kerakyatan...*, hlm.28.

<sup>99</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan, ...*hlm. 11

<sup>100</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan, ...*hlm. 12

2. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing. Dalam hal ini program PAMSIMAS juga melibatkan kelompok ini dalam proses tahapan pemberdayaan.
3. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Suharto, 2010: 60)<sup>101</sup>

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*)
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)
- c. Perbaikan tindakan (*better action*)
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
- e. Perbaikan usaha (*better business*)<sup>102</sup>
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*)
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*)<sup>103</sup>

Setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan dari setiap pembangunan di sesuaikan dengan aturan undang-undang<sup>104</sup>

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya proses menjadi lebih baik dari kondisi awal sampai setelah adanya pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu adanya prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: <sup>105</sup>

- a. Prinsip Demokratisasi, Prinsip ini dalam kegiatan pemberdayaan memberikan peluang dan kemudahan pada masyarakat dalam menentukan strategi dan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan

---

<sup>101</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 12

<sup>102</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 13.

<sup>103</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 14.

<sup>104</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 17

<sup>105</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 17

kapasitas yang dimiliki.<sup>106</sup> Dalam hal ini setiap kegiatan yang dilakukan melalui partisipasi dari masyarakat Sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan<sup>107</sup> Diberdayakan dalam kaitannya dengan pembangunan program PAMSIMAS ini dikarenakan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses air diwilayah tersebut.

- b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran.
- c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
- d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan
- f. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
- g. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi
- h. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan
- i. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif
- j. Menggerakkan partisipasi masyarakat<sup>108</sup>
- k. Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, Prijono (1996:73) mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>106</sup>Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), hlm. 22.

<sup>107</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 17

<sup>108</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 18

<sup>109</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, ...hlm. 19

- a. Pemerataan kesempatan. Hal ini perlu dilakukan untuk tidak memberikan tingkat kesenjangan bagi golongan kaya dengan miskin dalam semua aspek kehidupan
- b. Relevansi. Perbedaan kepentingan di setiap wilayah akan menunjang semua kebutuhan yang ada.
- c. Kualitas. Kualitas sumber tergantung dari sarana dan prasarana yang ada serta sumber manusia sebagai pengelola.
- d. Pengkoordinasian kegiatan. Hal ini dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi hambatan di masa mendatang.<sup>110</sup>

#### **D. Kesejahteraan Masyarakat**

Paradigma kesejahteraan cukup kontroversial dalam pandangan ekonomi konvensional. Salah satunya murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau bisa mengkaji sedikit aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan keuntungan dalam kebutuhan dasar yang bersifat pribadi (*selfinterest*) dan memaksimalkan harta benda, kenikmatan fisik, dan kepuasan diri sendiri<sup>111</sup>

Sedangkan Konsep kesejahteraan yang diinginkan dalam ekonomi islam secara singkat adalah:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yang mana mencakup dimensi material dan spiritual serta berkaitan dengan individu dan sosial
2. Kesejahteraan dunia maupun akhirat, dimana manusia hidup di dunia hanya sekali sedangkan di akhirat kekal maka idealnya kesejahteraan yang diutamakan adalah akhirat.

---

<sup>110</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAS PRESS, 2016), hlm. 59.

<sup>111</sup> Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 4.

Hal ini berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup yang di bingkai oleh ajaran islam yang biasa disebut dengan Fallah yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup<sup>112</sup> untuk mencapai hal itu perlu memegang pedoman hidup yaitu al-quran dan hadist di semua aktivitas kehidupan dunia yang tujuan utamanya hanya beribadah kepada Allah SWT dengan hal itu aktivitas yang dilakukan di semua bidang baik sosial, ekonomi, politik, dll akan memberikan masalah bagi semua pihak. Karena kemashlahatan umat dalam pemenuhan kebutuhan menjadikan masyarakat sejahtera.

Program PAMSIMAS ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air. Padahal air adalah kebutuhan dasar yang digunakan setiap hari. Dengan adanya program PAMSIMAS ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Bahkan program PAMSIMAS berupaya agar dalam pengelolaannya sangat memperhatikan kelestarian dari sumber air baku yang digunakan, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan tidak mengeksploitasi sumber air baku yang ada. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan dari program PAMSIMAS sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi yang akan datang.

Ekonomi Islam adalah bagian dari aturan Islam, yang mana harus berpedoman pada al-Quran dan sunah Rasul dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat<sup>113</sup> Maka dari itu tercapainya kehidupan yang lebih terhormat dengan menjaga hal yang dapat merusak lima prinsip dasar maqashid syariah<sup>114</sup>

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun spiritual. Nilai moral, spiritual dan sosial menjadi tolak ukur kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan

---

<sup>112</sup> M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 7.

<sup>113</sup> M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika...*, hlm 7.

<sup>114</sup> Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, hlm 9.

berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.<sup>115</sup> Maka dari itu kesejahteraan dalam ekonomi islam sangat kompleks. Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>116</sup>

Tolak ukur indikator keberhasilan dari program PAMSIMAS dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kebutuhan akan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dan juga meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta memiliki sarana sanitasi yang layak. Hal ini pun akan berdampak pada berkurangnya angka penderita diare.

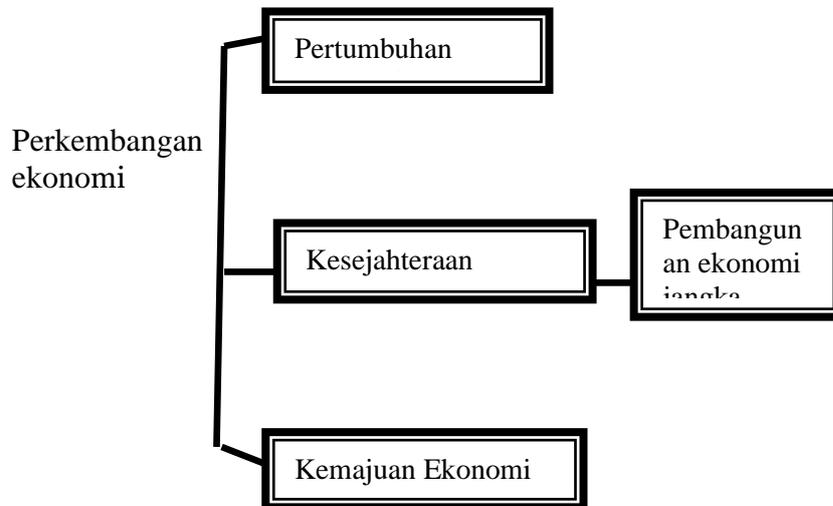
Di sebuah negara pembangunan merupakan kewajiban pemerintah yang mengemban tanggungjawab pada seluruh masyarakat dalam mencapai kesejahteraan di semua aspek kehidupan yang mana mereka harus mendistribusikan penerimaan negara kepada kaum dhuafa, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat lemah, menjamin kesehatan dan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi yang mana Schumpeter mengungkapkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi mengacu pada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi untuk negara yang berkembang.<sup>117</sup> Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari Gambar 1.1

---

<sup>115</sup> Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Ziauddin, NIM : 041114007, yang diuji pada tanggal 9 Februari 2016 Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 (Mei 2016); 395

<sup>116</sup> Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam ...hlm 395.

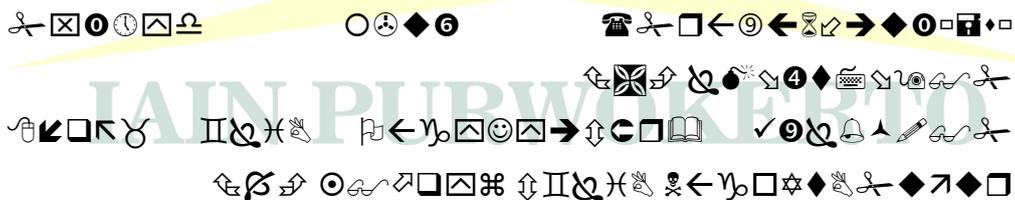
<sup>117</sup> Nurul Huda et.al, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.



**Gambar 1.1** alur perkembangan ekonomi

Sumber diolah dari berbagai macam sumber<sup>118</sup>

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. akan tetapi kesejahteraan akan lahir melalui proses sinergisitas pertumbuhan ekonomi.<sup>119</sup> Pertumbuhan ekonomi akan terwujud ketika adanya perubahan kondisi ekonomi yang berkesinambungan dimana menjadi lebih baik dan tujuan jangka panjang. Dalam konsep kesejahteraan sendiri sangatlah beragam bergantung perspektif yang digunakan. Dalam konteks ini filosofi kesejahteraan dinyatakan dalam QS al-Quraisy ayat 3-4 yaitu



*Artinya:*

*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.<sup>120</sup>*

<sup>118</sup> Nurul Huda et.al, *Ekonomi Pembangunan...*, hlm.2.

<sup>119</sup> Syauqi Beik, et.al, *Ekonomi Pembangunan Syariah*.(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 28.

<sup>120</sup> QS al-Quraisy 1-4



kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep masalah. Masalah pada dasarnya adalah manfaat dan berkah yang mana hal ini dapat tercapai dari proses kemanfaatan dan keberkahan. Namun tidak semua yang bermanfaat akan memberikan keberkahan, sebagai contoh minuman keras barangkali akan memberikan manfaat ekonomi berupa pajak tapi bisa dipastikan membawa ketidakberkahan. Maka dari itu semua yang barakah pasti bermanfaat, karena berpegang pada pedoman dalam al-quran dan hadist.<sup>123</sup>

Agar kebijakan yang di lakukan pemerintah memberikan manfaat dan keberkahan, untuk memperkuat kedaulatann ekonomi negara maka ada dua hal yang sangat penting agar tujuan tercapai antara lain; kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah dan dasar oerientasi kebijakan adalah perlindungan kaum dhuafa.<sup>124</sup>

Sebagai gambaran dari maqashid syariah dapat dilakukan dengan menjaga perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai mashlahah. Seperti istilah yang sering di gunakan Al syatibi dalam menggambarkan tujuan syariah.<sup>125</sup> Maka dari itu setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia di tuntutan mencari kemashlahatan yang mana kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi diikutsertakan kewajiban agama di dalamnya agar memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. Untuk itu kemashlatan umat manusia disebut dengan kebutuhan (needs).<sup>126</sup> Pemenuhan kebutuhan tesebut adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian tujuan ini adalah kewajiban agama. Maka manusia memiliki kewajiban dalam memecahkan permasalahan yang muncul pada aktivitas ekonomi manusia dimana dalam persepektif ekonomi islam pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia.<sup>127</sup> Sebagai motivasi individu dalam memenuhi kebutuhan tidak hanya menjaga jasmani akantetapi ruhaniah.<sup>128</sup>

---

<sup>123</sup> Syauqi Beik, et.al, Ekonomi Pembangunan..., hlm.30-31.

<sup>124</sup> Syauqi Beik, et.al, Ekonomi Pembangunan..., hlm. 31.

<sup>125</sup> Nur Chamidah, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 284.

<sup>126</sup> M Fahmi Khan, *Shatibi's Objectives of Syari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam *Abul Hasan M,Sadeq dan Aidit Ghazali*, Reading in islamics Thought, 193.

<sup>127</sup> Nur Chamidah, *Jejak langkah Sejarah...*, hlm. 284.

<sup>128</sup> Nur Chamidah, *Jejak langkah Sejarah...*, hlm. 284-285.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara memikul tugas berikut ini:

1. Kewajiban negara untuk mendistribusikan penerimaan negara kepada kaum fakir dan miskin
2. Kebutuhan dasar manusia
3. Keadilan sosial
4. Islam menekankan hak sosial atas harta individu
5. Melindungi yang lemah terhadap yang kuat
6. Pendidikan dan kesehatan
7. Memperhatikan spiritual warga negara<sup>129</sup>

Dalam perkembangannya, pembangunan akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat ini tentu memberikan kontribusi untuk wilayahnya. Adapun PAMSIMAS ini setiap bulan menarik iuran kepada para penggunanya didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan. PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bila pengelolaannya dilakukan dengan baik maka dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat. Karena dari iuran tersebut nantinya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES). Iuran yang masuk dari program ini merupakan hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat atas pemakaian air.

#### **E. Masalah dan nilai-nilai ekonomi islam**

Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma tauhid dalam menjalankan setiap aktivitas yang dilakukan manusia sebagai pemegang amanah dengan mengikuti rambu-rambu syariah untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan.

Filosofi dasar keadilan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dengan tidak mendzolimi<sup>130</sup> golongan satu dan

---

<sup>129</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm.306-315

lainnya agar sumber daya yang dikelola memberikan manfaat pada masyarakat. Dalam kaitannya kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sumber air bersih untuk memberikan kemudahan layanan air di seluruh wilayah perdesaan.

Maşlahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.<sup>131</sup> Oleh karena itu ketika kegiatan yang dilakukan memberikan lebih banyak manfaat daripada mafsadah masuk dalam kategori masalah dan sebaliknya.

Masalah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>132</sup>

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk dunia maupun akhirat,
- b. Menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun di akhirat<sup>133</sup>

Ada beberapa pembagian masalah yang dikemukakan oleh as-syatibi dalam 3 tingkatan yaitu:

1. Masalah daruriyyah (kebutuhan primer)

Masalah daruriyyah (kebutuhan primer) merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia dalam

---

<sup>130</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35.

<sup>131</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah" *Jurnal* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 226 <https://media.neliti.com/media/publications/93180-ID-implementasi-masalah-dalam-kegiatan-eko.pdf>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>132</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 nomor 1, Maret 2015, ISSN. 2502-6976, hlm 10, diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 8.00 WIB.

<sup>133</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 nomor 1, Maret 2015, ISSN. 2502-6976, hlm 12, diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 8.00 WIB.

menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya. Hal ini bertujuan menopang kemaslahatan aktivitas di dunia dengan memperhatikan agama agar terwujud keseimbangan. Apabila maqashid syariah ini tidak terpenuhi maka stabilitas dunia akan hancur sehingga mengakibatkan kerusakan kehidupan di akhirat dengan hilangnya keselamatan dan rahmat.<sup>134</sup>

## 2. Hjjiyah (kebutuhan sekunder)

Masalah Hjjiyah (kebutuhan sekunder) merupakan maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika maqāsid hajjiyah ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti memelihara lingkungan hidup dengan baik<sup>135</sup>

## 3. Masalah Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap)

Masalah adalah maqāsid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti mengelola sumber air dengan baik agar generasi yang akan mendatang ikut menikmati keberlimpahan air diwilayah tersebut.<sup>136</sup>

Tujuan utama syariat islam adalah tercapainya kesejahteraan manusia yang dititik beratkan pada perlindungan lima pilar maqashid syariah. Untuk mewujudkan tujuan hidup tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cukup kompleks sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam undang-undang memiliki

---

<sup>134</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah" *Jurnis* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 228 <https://media.neliti.com/media/publications/93180-ID-implementasi-masalah-dalam-kegiatan-eko.pdf>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>135</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah" *Jurnis* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 228 <https://media.neliti.com/media/publications/93180-ID-implementasi-masalah-dalam-kegiatan-eko.pdf>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>136</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah" *Jurnis* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 228 <https://media.neliti.com/media/publications/93180-ID-implementasi-masalah-dalam-kegiatan-eko.pdf>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

kewajiban melindungi masyarakat yang tidak berdaya dengan membuat program dengan keberpihakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan sosial. Landasan ini terdapat dalam firman Allah di surat al-Baqarah ayat 188:



*Artinya:.. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>137</sup>*

Pembangunan dalam ekonomi dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Tanggung Jawab

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan demi tercapainya masalah untuk seluruh umat manusia dengan memperhatikan kepercayaan yang diberikan dalam mengelola sumber air atau aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hajat orang banyak harus mengikuti aturan yang diberikan agar tujuan tercapai.

Seperti sabda Rasullulah SAW yang berbunyi : “Barangsiapa yang dibebankan oleh Allah SWT untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya”. (HR. Bukhari & Muslim,Shahih)<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Lihat QS.Al-Baqarah ayat 188.

<sup>138</sup> Kurnia Sukma Tari,” Implikasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Deskriptif Pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

## 2. Keadilan

Dalam banyak ayat, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam setiap aktivitas yang dilakukan di dunia.<sup>139</sup> Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa tegaknya keadilan akan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tidak merugikan golongan satu dengan yang lain dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, hilangnya keadilan akan merusak tatanan sosial dan menambah permasalahan baru.

Tujuan akhir dari maqashid al-syariah adalah masalah<sup>140</sup> Oleh karena itu, tujuan membangun sarana dan prasarana air bersih untuk kecukupan air di wilayah tersebut yang diatur dalam undang-undang akan memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan mafsadah.

### F. Hasil Penelitian yang relevan

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telah pustaka terhadap penelitian yang relevan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan jaminan objektivitas pembahasan. Diantara beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan sebagai karya ilmiah adalah sebagai berikut:

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait hasil penelitian terdahulu, maka penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel. 3 Perbandingan Penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang

No	Judul	Nama	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Faktor Keberlan	Onny Trijuniant o	Pengaruh pendampingan fasilitator dan	Persamaan Penelitian ini dengan	1. Sedangkan pada Penelitian

<sup>139</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro*, ...hlm. 35.

<sup>140</sup> Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana., 2014), hlm. 44

	<p>lanjutan Sarana Air Minum Program Pamsimas Di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>		<p>koordinator dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan</p>	<p>Penelitian terdahulu adalah sama-sama Program Pamsimas</p>	<p>terdahulu terfokus pada faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program</p>
--	--	--	---	---	---

2.	<p>Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Klaten</p>	<p>Myta Retno Widayanti (1). Suryanto (2)., Gunung Radjiman (3)</p>	<p>Pengukuran efektifitas dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu community leadership, community resource, community history, community organization</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas keberhasilan atau pencapaian tujuan</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif</p>
3	<p>Analisis Keberlangsungan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Sri Nengsi</p>	<p>Keberlangsungan program PAMSIMAS terlihat dari perubahan perilaku masyarakat dan manfaat sarana air bersih sejak dibangun hingga saat ini dan implementasi program dijalankan</p>	<p>Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan analisis secara umum sedangkan penelitian ini deskriptif</p>

			sesuai dengan aturan yang ada		
4	Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Ongoing Evaluation On Community-Based Clean Water And Sanitation Program	(1) Arif Budy Pratama, (2) Ajeng Tri Isnanik	Pelaksanaan program tersebut berdampak positif bagi masyarakat akan tetapi efisiensi pemanfaatan sumber daya masih butuh perhatian karena hasilnya belum maksimal	Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian ini menggunakan rambu-rambu maqashid syariah
5	Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Aceh Besar	T. Moch. Nazar1, Azmeri2, Eldina Fatimah 3	Keberhasilan program PAMSIMA S II di 15 desa di Kabupaten Aceh Besar terkait identifikasi peran serta masyarakat dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi	Persamaan Penelitian ini dan yang terdahulu adalah sama-sama membahas Program PAMSIMAS	1. Penelitian ini membahas cara pandang Program PAMSIMAS perspektif masalah
6	Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas Di Kecamatan Tembalang	Nurul Fitriyani dan Mardwi Rahdriawan	Evaluasi air Bersih secara menyeluruh terkait kinerja pelayanan untuk air bersih	Penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama Program PAMSIMAS	1. Penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif 2. Memberikan

			mencapai 1,9 sedangkan untuk pemanfaatan air bersihnya sendiri hampir 2,4, Permasalahan terbesar terkait dengan kualitas air bersih semakin memburuk akan tetapi masih bisa dimanfaatkan		gambaran atas kejadian yang terjadi di wilayah tersebut terkait dengan program PAMSIMAS lebih rinci dan detail
7	Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)	Vifin Rofiana	Target dari Program PAMSIMAS terkait dengan Pelaksanaan	Penelitian ini adalah sama-sama membahas tujuan dari PAMSIMAS sesuai aturan	Penelitian terdahulu menggunakan rambu-rambu secara global sedangkan penelitian ini lebih fokus pada rambu syariah
8	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok Dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung).	Chika Chaerunnissa	Partisipasi masyarakat atas program PAMSIMAS terdapat faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan	Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis yang digunakan yaitu penelitian terdahulu menggunakan swot penelitian ini deskriptif

			tersebut		
9	Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat Pada Program Pamsimas Di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara	Mochammad Qomaruddin (1), Arie Irvanto Adhi Saputra (2), Tri Hanafiah Munawaroh (3), Zurfa Isnaini (4), Silviana Ika Ariyani (5)	Peran BPSPAM PAMSIMAS S berkelanjutan terkait partisipasi masyarakat dalam meningkatkan jaringan dan pendapatan	Penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama Program PAMSIMAS	Penelitian terdahulu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini deskriptif

### G. Kerangka Berfikir

Dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk terkait dengan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan maka dari itu pemerintah secara terus menerus memperbaiki program yang awal mulanya fokus pada desa yang kesulitan dalam mengakses air bersih sehingga pemerintah merumuskan dan melaksanakan berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari pembinaan sumber daya manusia yang ada di Desa tersebut, Pencarian lokasi sumber air layak, pembuatan proposal yang didampingi oleh dinas yang terlibat di dalam program, bimbingan teknis, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas, masyarakat yang terlibat dalam program untuk ikut serta baik investastasi fisik maupun non fisik, program ini sebagai salah satu media pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan maupun di pinggiran kota yang dikenal dengan PAMSIMAS.

Melalui PAMSIMAS diharapkan semua masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di semua wilayah. Munculnya gagasan tentang Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program PAMSIMAS di dasarkan pada pemikiran bahwa keterlibatan masyarakat dalam

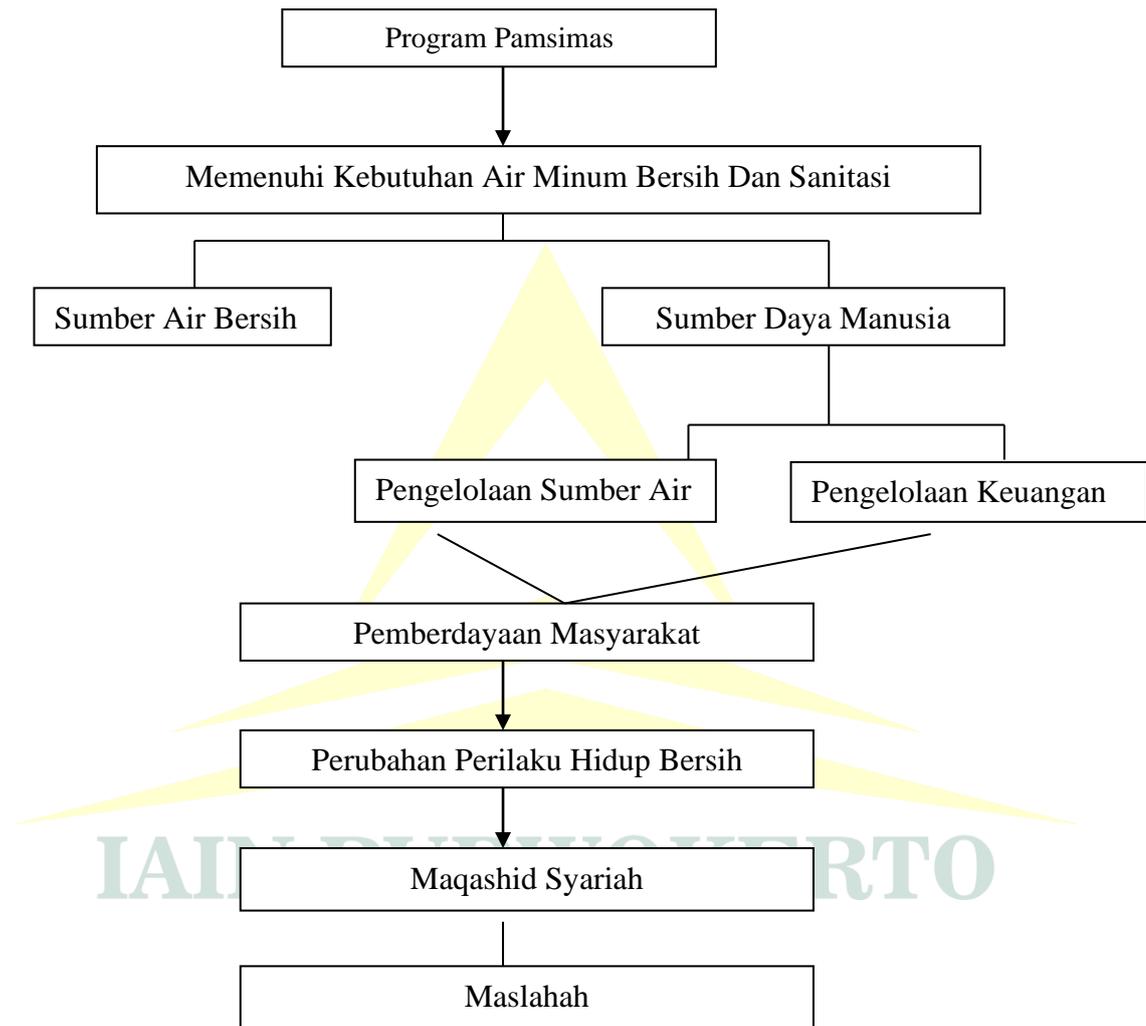
mendukung dua agenda nasional dalam meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi mencapai 100% di masing-masing wilayah yang tersebar di 233 kabupaten kota sangat penting.

Program PAMSIMAS melalui Pemberdayaan masyarakat di maksudkan juga akan mempermudah akses air minum dan sanitasi di semua wilayah baik perdesaan maupun perkotaan dalam layanan air bersih secara menyeluruh. Agar proses Program Pamsimas melalui pemberdayaan masyarakat lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Ini berarti bahwa keterlibatan masyarakat baik laki-laki perempuan, miskin kaya, pelaku utama dalam mengambil keputusan utama dan penanggungjawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi serta terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan PAMSIMAS. Di harapkan melalui pendekatan ini menjadi media dalam proses pengembangan program PAMSIMAS yang berkelanjutan. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah bahwa semua elemen ikut terlibat langsung untuk mewujudkan tujuan dari program tersebut lebih bisa dirasakan desa yang belum mencapai 100% dalam mengakses air minum yang aman di daerahnya dan memiliki kemauan untuk mengikuti tahapan. Program PAMSIMAS harus dijadikan media pengembangan sumber daya manusia, perubahan perilaku kurang bersih menjadi lebih baik, ketersediaan sumber air minum yang aman baik masyarakat yang ikut berpartisipasi maupun tempat umum seperti sekolah, masjid.

Selama ini kesan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang di berikan pemerintah hanya bersifat top down. Sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memilih apa yang dibutuhkan oleh mereka. Program PAMSIMAS sendiri melakukan inovasi terkait dengan pendekatan pemberdayaan msyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum aman dan sanitasi di perdesaan dengan tujuan agar semua terlayani dengan baik tanpa adanya perbedaan golongan. Pratisipasi masyarakat dalam Program ini sangat menentukan keberhasilan program. Maka perlu adanya Program PAMSIMAS Perspektif Masalah. Agar

keberhasilan program tidak hanya sebatas partisipasi masyarakat. Adapun bagan alur kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Alur Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.<sup>141</sup> Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (*in depth study*) terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai objek penelitian, yaitu Program PAMSIMAS Baleraksa.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Studi Kasus. Hal ini karena penelitian terfokus pada kasus tertentu untuk dianalisis dan di amati secara detail dan dapat mengumpulkan berbagai informasi mendalam mengenai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dalam perspektif mashlahah.

Menurut Robert K. Yin, Studi Kasus merupakan pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena kontempore (masa kini) di dalam konteks kehidupan.<sup>142</sup> Pendekatan ini menggunakan analisis berbagai aspek, dimana penelaah tidak saja memperhatikan cara pandang dari tokoh saja tetapi pihak yang terlibat langsung dalam program tersebut.

Langkah yang digunakan dalam studi kasus yaitu pengumpulan data, analisis dan menulis. Hal pertama yang perlu dipahami bahwa studi kasus adalah masalah yang diteliti oleh penelaah untuk di pecahkan. Kasus ini harus

---

<sup>141</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008) hlm.26

<sup>142</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain & Metode*, terj. M Dauzi Mudzakir (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 1.

memiliki informasi mendalam, yang mana peneliti memahami permasalahan yang ada dan mampu mengembangkannya menjadi kerangka analisis agar terselesaikan masalah tersebut.<sup>143</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dalam perspektif masalah di Desa Baleraksa.

## **B. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Pemilihan Desa Baleraksa dalam pelaksanaan studi kasus ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Program PAMSIMAS yang ada di Desa Baleraksa dibangun atas dasar tingginya partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pembangunan program. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang program PAMSIMAS di Desa Baleraksa. Karena walaupun PAMSIMAS adalah program pemerintah, namun tanpa partisipasi masyarakat program tersebut tidak akan mengalami perkembangan. Kemudian pada umumnya banyak program pemberdayaan masyarakat dalam administrasi pelaporannya tidak tercatat. Sedangkan Program PAMSIMAS Desa Baleraksa secara administrasi pelaporan tercatat rapi. Program PAMSIMAS Desa Baleraksa adalah asset besar, yang apabila pengelolaanya tepat. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan air di Desa Baleraksa, namun juga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini dibuktikan dengan akan dibangunnya unit usaha baru berupa isi ulang air galon di Desa Baleraksa yang di kelola oleh BUMDES setempat . Kedepan akan muncul unit-unit usaha baru yang kreatif dan inovatif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Baleraksa.

Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, yaitu 23 Desember – 21 Januari 2021

---

<sup>143</sup> Burhan Bungain, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi , Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 132.

### C. Data dan sumber penelitian

Sumber data dari Penelitian ini merupakan kata dan tindakan, serta bentuk dokumen dan data yang diperoleh. Berkaitan dengan hal ini jenis data yang akan disajikan berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>144</sup> Untuk itu data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan sumber data yang berada di lokasi penelitian untuk menganalisis program PAMSIMAS dan masalah program tersebut di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

### D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sesuai situasi yang bersahaja (*Natural Setting*), serta untuk sumber utama dan proses pengumpulan data lebih banyak pada pemantauan, tanya jawab mendalam dengan jumlah responden adalah DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga, Ketua Pengelola PAMSIMAS di Baleraksa, Konsultan Program pamsimas, BUMDES, masyarakat penerima manfaat/pengguna program pamsimas di Desa Balekasa sebagai dokumentasi.<sup>145</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam riset ini diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Metode Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara khas dalam hubungan sosial, yang mana butuh waktu peneliti dalam riset serta mencatat hasil dengan sistematis.<sup>146</sup> Maka penulis membutuhkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>144</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitatif*, Cet. 13 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 159.

<sup>145</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan....*, hlm. 309.

<sup>146</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Pendidikan....*, hlm. 117.

langsung.<sup>147</sup> Dalam hal ini, peneliti datang ke Desa Baleraksa untuk mengetahui secara langsung program PAMSIMAS.

Peneliti dalam melakukan observasi terkait program PAMSIMAS langsung bertemu dengan pemerintah Desa Baleraksa juga pengelola PAMSIMAS. Beberapa data yang di peroleh diantaranya yaitu sejarah awal mula dibangunnya PAMSIMAS, profil Desa Baleraksa, laporan tahunan pengelolaan program PAMSIMAS, rencana anggaran biaya pembangunan PAMSIMAS juga jumlah pengguna program. Data-data yang telah diperoleh menjadi dasar untuk dapat mengetahui program dalam perspektif masalah

## 2) Metode Wawancara

Perbincangan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, untuk menemukan tanggapan dari poin yang di diskusikan<sup>148</sup> Wawancara ini lebih mendalam dan jumlahnya sedikit. Hal ini yang mempengaruhi wawancara adalah pewawancara, orang yang diwawancarai, pedoman wawancara dan situasi wawancara.<sup>149</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan, pemerintah Desa Baleraksa juga 50 orang sebagai penerima manfaat.

Interview/Wawancara dalam hal ini penulis tujuan kepada penanggungjawab program PAMSIMAS di DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga, penanggungjawab Dinas Kesehatan, Konsultan/Pendamping Program PAMSIMAS tingkat kabupaten dan provinsi, teknisi PAMSIMAS Desa Baleraksa, Ketua pelaksana program PAMSIMAS dan Ketua pengelola PAMSIMAS Desa Baleraksa, ketua BUMDES Desa Baleraksa, tokoh agama Desa Baleraksa, masyarakat penerima manfaat program pamsimas di desa

---

<sup>147</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

<sup>148</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Pendidikan...*, hlm.135.

<sup>149</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 29.

baleraksa untuk mengetahui sejauhmana kebermanfaatan dari program PAMSIMAS di Desa Baleraksa yang sudah dirasakan oleh para pengguna. Penerima manfaat dari program PAMSIMAS ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat umum saja, melainkan juga tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan juga pesantren di Desa Baleraksa. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah.

Wawancara ini perlu dilakukan kepada orang-orang yang memang terlibat langsung dalam pembangunan program PAMSIMAS juga penerima manfaat. Sehingga data atau informasi yang digali bersifat relevan dan akuntable.

### 3) Metode Dokumentasi

Cara pengumpulan dengan memilih data terkait dengan topik yang sesuai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, rancangan dan sebagainya.<sup>150</sup> Dokumen tersebut antara lain adalah panduan teknis program PAMSIMAS, Peraturan yang mengatur Program PAMSIMAS dan laporan-laporan perkembangan Program PAMSIMAS di Baleraksa. Dokumen yang di peroleh digunakan untuk mengetahui pengelolaan dan penerapan maqashid syariah pada program PAMSIMAS di Desa Baleraksa.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting.<sup>151</sup> Hal ini diperlukan untuk mempermudah orang lain dan diri sendiri memahami kesimpulan dari karya ilmiah yang di susun.

Dalam melakukan analisis data, peneliti mengkomparasikan teori dengan data yang telah di peroleh di lokasi penelitian. Hal ini untuk

---

<sup>150</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...* hlm. 211.

<sup>151</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Cetakan ke 17* (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 244

mengetahui pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa sudah sesuai dengan maqashid syariah atau belum. Peneliti juga membagikan angket untuk mengetahui sejauh mana penerapan maqashid syariah pada program PAMSIMAS Desa Baleraksa.

Hal ini dilakukan untuk menggabungkan bukti yang sudah tersedia dalam notulen arsip (data sekunder), seperti penelitian terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan Program PAMSIMAS, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan, Maqashid syariah. Analisis ini memiliki fungsi sebagai penunjang atau tambahan dari keterangan mendasar yang diperoleh melalui peninjauan dan tanya jawab mendalam dengan melakukan Observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Dokumen yang akan dianalisis relevan dengan penelitian ini agar hasil penelitian memberikan kontribusi pada semua pihak.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh sugiyono bahwa dalam riset kualitatif instrumen yang utama adalah penelaah sendiri. Sedangkan setelah investigasi sudah jelas, maka akan dikembangkan menjadi studi yang lebih alamiah, yang diharapkan dapat menyempurnakan bukti dan mengumpamakan data setelah melakukan observasi dan wawancara. Adapun alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang dimaksudkan seperti buku, alat tulis, kamera, hp, handycam.

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, analisis pada penulisan ini berfokus pada pengelolaan program PAMSIMAS dan penerapan maqashid syariah dalam program PAMSIMAS. Orang akan dijadikan informan dalam penulisan ini adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan analisis tersebut oleh karena itu pihak yang menjadi informan adalah pihak yang ada di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, maka peneliti memilih informan sebagai berikut:

1. Konsultan/Pendamping Program PAMSIMAS tingkat kabupaten dan provinsi, teknisi PAMSIMAS Desa Baleraksa, Ketua pelaksana program PAMSIMAS dan Ketua pengelola PAMSIMAS Desa Baleraksa, ketua BUMDES Desa Baleraksa, sebagai subjek dalam penulisan dan

merupakan informan yang paling memahami seluk beluk yang terjadi di Desa Baleraksa.

2. Masyarakat penerima manfaat/pengguna program pamsimas di desa baleraksa dan tokoh agama Desa Baleraksa, karena mereka adalah objek yang merasakan dampak dari program PAMSIMAS
3. Pemerintah Desa Baleraksa selaku pemangku kebijakan wilayah setempat



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Baleraksa termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol dimana jarak menuju ke kecamatan kurang lebih 5 km dengan menggunakan sepeda motor sedangkan menuju ke pusat kabupaten berjarak sekitar 25 km<sup>152</sup>.

Desa Baleraksa terdiri dari 5 Dusun yaitu 10 RW 40 RT. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Dusun I**

Dusun I merupakan dusun awal masuk Desa Baleraksa yang perbatasan dengan Desa Karangsari dengan jalan raya milik PEMDA. Dusun I terdiri dari 2 RW yang meliputi wilayah RW V terdiri dari 5 RT yaitu grumbul karangemplak dan RW VI terdiri dari 4 RT termasuk grumbul karangrandu.

##### **b. Dusun II**

Salah satu dusun paling atas, tepatnya perbatasan antara Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat yang dibatasi oleh sungai kali singa sebagai penghubung antar Desa, Dusun II ada di wilayah RW 9 yang terdiri dari 3 RT dan RW 10 hanya 2 RT.

##### **c. Dusun III**

Merupakan dusun yang berada di tengah-tengah di wilayah RW 8 dengan jumlah 4 RT dan RW 7 dengan 4 RT

---

<sup>152</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

d. Dusun IV

Dusun yang mengelilingi pusat pemerintahan yaitu kantor balaidesa dan berhadapan dengan sekolah MIMA 1 Baleraksa yang ada di wilayah RW 04 dengan 4 RT dan RW 3 dengan 4 RT.

e. Dusun V

Merupakan dusun yang berada di titik paling rendah di Desa Baleraksa yang berdekatan dengan lapangan sepak bola di wilayah RW 1 yang terdiri dari 4 Rt serta RW 2 berada di seberang lapangan sepak bola dan berdekatan dengan Poli Klinik Desa (PKD) dengan jumlah 5 RT dan 4 RT sebelah dengan desa tamansari.<sup>153</sup>

*Gambar 1.4 Peta Desa Baleraksa*



Desa baleraksa dibagi menjadi 3 wilayah yaitu baleraksa 1 (Karangwringin), Baleraksa 2 (karang gude dan Karang Plak), dan Baleraksa 3 (Karang sawah, Karang duren, sampai ujung utara desa yaitu brobahan)<sup>154</sup>. Untuk Dusun di wilayah Desa Baleraksa terdiri dari 5 Dusun, 10 RW, 40 RT. Topografi dan jenis tanah memiliki ketinggian 35,30 m diatas permukaan laut sehingga tergolong dataran tinggi maka curah hujan rata-rata 3.698 Mm/th

<sup>153</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

<sup>154</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,\\_Karangmoncol,\\_Purbalingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,_Karangmoncol,_Purbalingga), 1 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB

dengan rata-rata suhu 36%. Luas wilayah Desa Baleraksa yaitu 443 Ha, terdiri dari:<sup>155</sup>

- a. Sawah irigasi dan setengah teknis : 192 Ha
- b. Irigasi sederhana : 94,620 Ha
- c. Hutan karet : 160 Ha
- d. Pekarangan dan Bangunan : 13,340 Ha
- e. Tegalan : 21 Ha<sup>156</sup>

Sisanya terdiri dari perkebunan, kebun campur, tegalan, lahan usaha perikanan. Adapun batas-batas Desa Baleraksa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa keramat dan Tunjungmuli
- b. Sebelah timur : Desa Tamansari
- c. Sebelah selatan : Desa Karang Sari
- d. Sebelah barat : Kecamatan Kertanegara<sup>157</sup>

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Desa Baleraksa pada tahun 2018 memiliki 2.470 KK dengan jumlah penduduk 9.289 jiwa yang terdiri dari 4.763 jiwa laki-laki dan 4.526 jiwa perempuan. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	764
2	6-10 Tahun	812
3	11-20 Tahun	1.749
4	21-30 Tahun	1.659
5	31-40 Tahun	1.579
6	41-50 Tahun	1.044

<sup>155</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

<sup>156</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

<sup>157</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

7	51-60 Tahun	783
8	61-70 Tahun	494
9	70 Keatas	401
	Jumlah	9.289

Sumber: Sumber data Sekunder Monografi Desa Baleraksa 2017<sup>158</sup>

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk Desa Baleraksa sebagian besar adalah kelompok usia produktif (Usia 11-60 Tahun) yang mencapai 6.818 Jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk usia non produktif (usia 0-11 Tahun dan 61 tahun keatas) mencapai 2.471 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Baleraksa masih banyak penduduk yang produktif.

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan tinggi maka dapat meningkatkan kecakapan. Taraf pendidikan tinggi akan membawa perubahan kehidupan masyarakat. Layanan/fasilitas Pendidikan di Desa Baleraksa adalah 2 taman Kanak-kanak, 4 RA Diponegoro, 2 Sekolah Dasar Negeri, 3 MI, 1 SMP, 3 Play Grup, dan 4 TPQ.<sup>159</sup> Komposisi penduduk Baleraksa dan 1 Pondok Pesantren dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 5  
Komposisi Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Sarjana	294
2	Tamat Diploma	114
3	Tamat SMA/SLTA	1.280
4	Tamat SMP/SLTP	2.086
5	Tamat SD/MI	2.845
6	Belum Tamat SD/MI	1.083
7	Tidak Sekolah	1.587
	Jumlah	9.289

<sup>158</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

<sup>159</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Sumber: Sumber data Sekunder Monografi Desa Baleraksa 2017<sup>160</sup>

Melihat data diatas, bahwa pada tahun 2017 sumber daya manusia Desa Baleraksa tingkatan SLTA- Sarjana adalah 1.688 jiwa sedangkan SD-SLTP adalah 4.931 jiwa, serta tidak tamat SD dan tidak sekolah hampir 2.670 jiwa. Terdapat pula Pondok pesanteran Darul ulum yang sudah berdirisekitar tahun 1926 yang terletak di dusun karangduren RT 02 RW 07. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang memadai untuk bisa mengelola sumber air minum dengan melaksanakan pembangunan. Program penyediaan air minum dan sanitasi membutuhkan sumber daya manusia untuk ikut serta dalam pelatihan keuangan, teknis, dan pengembangan kelembagaan.

c. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa Baleraksa adalah PNS, Petani dan dagang. Potensi yang ada di Desa ini yaitu Produksi rumahan konveksi, peternakan ayam, gula kelapa, hasil olahan lele dan perkebunan karet<sup>161</sup>. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 6  
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Apoteker	1
2	Belum kerja	1572
3	Bidan	9
4	Buruh Harian Lepas	81
5	Buruh Tani/Perkebunan	159
6	Dosen	3
7	Guru	115
8	Juru masak	1
9	Karyawan bumd	1
10	Karyawan BUMN	3
11	Karyawan honorer	35
12	Karyawan swasta	1648

<sup>160</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

<sup>161</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,\\_Karangmoncol,\\_Purbalingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,_Karangmoncol,_Purbalingga), 1 Januari 2021 Pukul 09.00

13	Konstruksi	2
14	Mengurus rumah tangga	1067
15	Paranormal	1
16	Pedagang	317
17	Pelajar/ Mahasiswa	1990
18	Pelaut	1
19	Pembantu rumah tangga	20
20	Pensiunan	20
21	Perangkat desa	9
22	Perawat	5
23	Perdagangan	242
24	Petani/perkebun	945
25	Pialang	1
26	PNS	97
27	Sopir	35
28	Transportasi	7
29	Tukang batu	36
30	Tukang gigi	1
31	Tukang jahit	5
32	Tukang kayu	9
33	Tukang listrik	3
34	Ustadz/mubaligh	7
35	Wiraswata	821
Jumlah		9289

Sumber: Data Sekunder Monografi Desa Baleraksa<sup>162</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Baleraksa lebih banyak sebagai Petani/Pekebun 945 Jiwa dan Buruh Tani/Perkebunan 159 Jiwa sedangkan Buruh Harian Lepas 81 Jiwa. Jika dilihat dari Potensi yang di miliki masyarakat baleraksa seperti produksi rumahan konveksi, peternakan ayam, gula kelapa dan hasil olahan ikan lele dan perkebunan karet sangat di sayangkan sangat sedikit yang menjadi pekebun dan persediaan air PAMSIMAS sudah di bangun dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

<sup>162</sup> Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

d. Kondisi Rumah Tangga

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga menjadi 3. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 7  
Komposisi Penduduk Berdasarkan Sosial Ekonomi

No	Keterangan	Jumlah (Rumah)
1	Jumlah rumah tangga kelompok mampu	698
2	Jumlah rumah tangga kelompok menengah	1000
3	Jumlah rumah tangga kelompok tidak mampu	500
4	Jumlah total rumah tangga	2198

Sumber: Data sekunder monografi Desa Baleraksa 2017

Dilihat dari tabel menunjukkan bahwa masyarakat yang tingkat sosial ekonomi menengah dalam rumah tangga mencapai 1000 rumah tangga, kelompok menengah kebawah 500 rumah tangga dan 698 dalam kategori menengah keatas. Hal ini menjadi penilai sasaran program tingkat Desa yang akan di utama terlebih dulu yang dalam kategori menengah ke bawah kurang lebih 500 KK.

e. Prasarana dan Pengguna Air Bersih

Prasana dan pengguna air bersih dapat dilihat dalam data jumlah prasarana dan pengguna air bersih sebagai berikut:

Tabel. 8  
Jumlah Prasarana dan Pengguna Air bersih

Prasarana	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (rumah)	Jumlah rusak (unit)
Mata Air	2	0	0
Sumur Gali	101	101	0
Sumur Pompa	3	3	0
Perpipaan Desa	327	327	0
PDAM	0	0	0

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa Desa baleraksa masuk dalam kriteria sasaran program PAMSIMAS karena belum ada PDAM yang masuk ke Desa tersebut.

## **B. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Baleraksa**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa aspek tujuan, sasaran, Prinsip, Pendekatan, Pendanaan antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa

Dari hasil data yang terkumpul oleh peneliti terkait tujuan pembangunan sarana dan prasarana sumber air baku adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kecukupan air bersih di seluruh wilayah yang ada di Desa Baleraksa
- b. Meningkatkan akses sanitasi
- c. Meningkatkan unit usaha baru setelah pembangunan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan kepedulian akan lingkungan
- e. Meningkatkan sumber daya manusia dalam kelembagaan
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Dari tujuan pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Baleraksa akan terealisasi ketika semua pihak yang menjadi pelaku utama/bertanggung jawab dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, operasional dan keberlanjutan program ikut berpartisipasi untuk keberhasilan dengan menumbuhkan kembali gotong royong yang sudah mulai hilang di wilayah perdesaan.

## 2. Sasaran Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa

Untuk mewujudkan tujuan dari program perlu target yang akan di capai dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun setelah pembangunan agar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemangku kebijakan

Tabel. 9. Kriteria Sasaran Program

Kriteria Sasaran Program	Keterangan
Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas	ya
Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%	Ya
Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%	Ya
Prevalensi penyakit diare	-
Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien	Ya
Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan	Ada
Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:	Ada

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Baleraksa masuk dalam kriteri sasaran program pada tahun 2016 untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2017. Oleh karena itu, untuk pengembangan BP-SPAMS Tirta Amanah

Tabel.10.

Sasaran Program Pengembangan BP-SPAMS Tirta Amanah di Desa Baleraksa

No	Uraian Sasaran Program	Sasaran Penanganan	Sasaran Program Tahun I-V
1	Pengawasan Pengembangan BP-SPAMS	Tingkat Desa	Tingkat Desa
2	100 %	Tingkat Desa	Tingkat Desa

	Terfasilitasi		
3	Pembangunan Penambahan BAK Penampung	Tingkat Desa	Tingkat Desa
4	Unit Usaha Baru	Tingkat Desa	Tingkat Desa
6	Pembangunan Jembatan	Tingkat Desa	Tingkat Desa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran yang akan di capai BP-SPAMS Tirta Amanah dalam Kurun Waktu 1-V dalam pengembangan salah satu yang sudah terlaksana adanya unit usaha baru berupa air galon serta pengawasan yang dilakukan pemerintah desa sebagai pihak yang memberikan dana yang cukup tinggi untuk mewujudkan ketersediaan air bersih di Desa Baleraksa yang mana lokasi sumber baku berada di Desa Tunjungmuli sehingga distribusi air ke rumah warga hampir tidak ada yang mengalami kemacetan serta peningkatan pengguna layanan BP-SPAMS perlu adanya penambahan BAK penampung. Untuk mengetahui detail program PAMSIMAS harus ada pengawasan agar kegiatan evaluasi dan perbaikan untuk keberlanjutan untuk generasi mendatang terlaksana.

### 3. Pendekatan Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa

Pelaksanaan dan pengelolaan program ini menggunakan pendekatan kolaborasi antar kementerian an lembaga berbasis TUPOKSI, Pemilihan Desa dilakukan oleh pemegag kebijakan untuk mempercepat pencapaian akses air minum dan sanitasi secara universal serta penanggungjawab utama kegiatan dan pengelolaan adalah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang di berikan tanggungjawab untuk mensosialisasikan program di setiap Dusun dengan tujuan keselarasan demi terwujudnya pembangunan sumber air minum yang berkelanjutan. Keberlanjutan program ini tergantung tingkat kesadaran masyarakat.

4. Prinsip Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa

Tabel. 11.

Prinsip Program PAMSIMAS

Prinsip	Keterangan
Tanggap Kebutuhan	Dari hasil temuan bahwa kebutuhan akan air bersih di Desa Baleraksa belum mencapai 100%, untuk itu Desa baleraksa menjadi sasaran program.
Partisipatif	Sampai tahun 2020 pengguna layanan akses air minum sebanyak 535 orang
Kesetaraan Gender	Dari laporan BP-SPAMS Tirta Amanah bahwa sambungan rumah dan sambungan sosial baik laki-laki, perempuan, janda, tua, muda, kaya dan miskin ikut terlibat di dalamnya.
Keberpihakan Masyarakat Miskin	Ya
Akses bagi semua masyarakat	Ya
Perlindungan pada anak	Ya
Keberlanjutan	Adanya laporan tertulis BP-SPAMS Tirta Amanah pada tahun 2018-2020 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan program tersebut
Transparansi dan akuntabilitas	Ya

Berbasis Nilai	Ya
----------------	----

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa memenuhi prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program tidak ada yang dirugikan. Dalam ekonomi islam, merugikan golongan satu dengan yang lain itu tidak diperbolehkan terutama pengelolaan sumber air baku yang menyangkut hajat orang banyak.

#### 5. Pendanaan Program PAMSIMAS di Desa Baleraksa

Sumber dana untuk pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa bersumber dari APBN sebesar Rp 245.000.00), serta dana In Cash Rp 14.000.000, In Kind Rp 56.000.000 dan Dana Desa sebesar Rp 675.142.000. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Pusat dimana Dana dari BLM sebesar 70% untuk pelaksanaan, 10 Dana Desa dan 20% swadaya masyarakat. Untuk itu ada kesepakatan bagi hasil yang diberikan oleh pengelola pada pemerintah Desa menjadi Pendapatan Asli Desa.

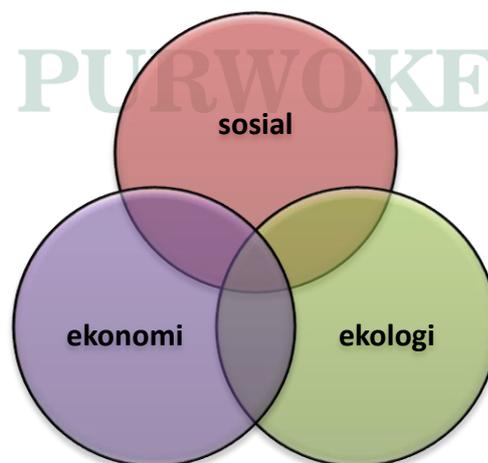
Bagi hasil untuk Desa/PAD disesuaikan dengan pendapatan BP-SPAMS Tirta Amanah setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bagi hasil PAD tahun 2108 mencapai Rp 5.194.600 dan ditahun 2019 sebesar Rp 4.134.400

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dari aspek pemberdayaan masyarakat melalui stimulan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan BP-SPAMS Tirta Amanah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Stimulan

Pembangunan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa bermula dari keprihatinan pemerintah desa setempat karena sulitnya masyarakat dalam mengakses air bersih terutama saat musim kemarau. Sebelum memulai pembangunan saluran air, pemerintah desa setempat memberikan arahan dan juga mensosialisasikan program PAMSIMAS kepada masyarakat di Desa Baleraksa. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan saluran air bersih tersebut. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS dibangun dari swadaya masyarakat, oleh partisipasi masyarakat dan manfaatnya pun untuk masyarakat.

Hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup akan selalu berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap pembangunan berkelanjutan tentunya berpengaruh pada sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Dampak yang di timbulkan dari pembangunan berkelanjutan akan mengarah pada sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tidak melulu soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga faktor sosial dan juga ekologi yang harus di perhatikan.



Gambar diatas disebut sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. PAMSIMAS adalah program pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada

pembangunan berkelanjutan. Terbukti dalam penggunaan sumber air yang digunakan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengambilan air baku yang digunakan sangat terukur dimana hanya mengambil debit sesuai dengan kebutuhan dengan perhitungan teknis dan dengan debit sumber yang begitu besar diambil hanya 4 liter per detik sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Sejalan dengan tujuan dari pembangunan sarana dan prasarana sumber air tidak hanya tertuju pada air bersih tetapi sanitasi lingkungan yang mengharuskan masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan membuat jamban di masing-masing rumah agar lingkungan sekitar menjadi lebih sehat dan bersih. Untuk tahun 2017 akses jamban baru mencapai 76% dimana masih ada masyarakat yang menggunakan jamban yang menumpang tetangga dan masih ada orang yang BAB di sungai atau kebun sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>163</sup>

Pemicuan bersama sanitasi puskesmas setempat dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat Desa baleraksa terkait pentingnya merubah perilaku hidup bersih dan sehat dengan membuat jamban di masing-masing rumah sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar. Kegiatan ini pada awalnya dilaksanakan di dusun 5 RW 1 dan Dusun 2 RW 09 dengan simulasi secara nyata. Sosialisasi yang dilakukan puskesmas setempat pada dua dusun memicu masyarakat untuk memiliki jamban sehat sekitar 5 rumah dan dilakukan pembagian 60 paket jamban bersih di dusun tersebut yang menjadikan akses jamban sehat mencapai 100% ditahun 2018.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Laporan PRA RAT (Rapat Akhir Tahunan) BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

<sup>164</sup> Pengelola BP-SPAMS Tirta Amanah, Laporan Rapat Akhir Tahun BP-SPAMS Tirta Amanah, Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga Tahun 2018.

Tabel. 12. Prosentase Akses Jamban di Desa Baleraksa

Tahun	Prosentase akses jamban di Desa Baleraksa
2017	50 %
2018	72%
2019	92%

Dari uraian diatas bahwa pemberdayaan masyarakat melalui stimulan pemasangan jamban sehat di Desa Baleraksa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa program PAMSIMAS dalam merubah perilaku hidup sehat tercapai. Konsekuensi logis dari tercapainya tujuan ini dapat meningkatkan tingkat pemakaian air di sambungan rumah warga yang menggunakan layanan akses air minum serta memberikan nilai ekonomi dalam pengelolaan BP-SPAMS

b. Pengembangan Kelembagaan BP-SPAMS Tirta Amanah

Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Baleraksa tidak hanya semata membangun saluran air kemudian dibiarkan begitu saja, melainkan juga lebih jauh dampaknya terhadap peningkatan ekonomi, sosial dan juga kelestarian ekologi. Adapun saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilibatkan, karena PAMSIMAS adalah salah satu unit usaha milik desa. Sehingga pendapatan yang dihasilkan dari tarikan tiap bulannya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel laporan per tahun BP-SMPS Tirta Amanah sebagai berikut:

Tabel. 13.

## Laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2018

LAPORAN BP-SPAMS TIRTA AMANAH Tahun 2018			
No	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran
1	28/02/2018	Rp 8.247.000,00	Rp 697.000,00
2	31/03/2018	Rp 1.914.500,00	Rp 6.593.000,00
3	30/04/2018	Rp 3.186.000,00	Rp 1.819.800,00
4	31/05/2018	Rp 3.868.000,00	Rp 1.999.500,00
5	30/06/2018	Rp 7.776.000,00	Rp 2.919.000,00
6	31/07/2018	Rp 8.100.000,00	Rp 3.684.000,00
7	31/08/2018	Rp 13.409.000,00	Rp 2.888.000,00
8	30/09/2018	Rp 11.445.000,00	Rp 4.154.000,00
9	31/10/2018	Rp 11.183.000,00	Rp 9.182.000,00
10	30/11/2018	Rp 7.783.000,00	Rp 6.717.500,00
11	31/12/2018	Rp 6.113.000,00	Rp 4.734.000,00

Dari laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan sumber air sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan penerimaan dan pengeluaran dipengaruhi oleh jumlah SR, pemakaian sumber air setiap bulannya, dan tingkat permasalahan dalam pemeliharaan sumber air saat mengalami kebocoran pipa dari sumber mata air yang ada di Desa Tunjungmuli dengan jarak 7 Km dari Desa Baleraksa sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi besar serta pengelolaan keuangan layanan sumber air minum tercatat di Desa Baleraksa hal ini menunjukkan adanya transparansi dari pengelolaan keuangan PAMSIMAS. Keuntungan yang di dapatkan BP-SPMAS ditahun 2018 mencapai Rp 37.336.500.

IAIN PURWOKERTO

<sup>165</sup> Laporan PRA RAT (Rapat Akhir Tahunan) BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Tabel.14. Laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2019

LAPORAN BP-SPAMS TIRTA AMANAH Tahun 2019			
No	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Pengeluaran
1	31/01/2019	Rp 6.539.000,00	Rp 4.211.200,00
2	28/02/2019	Rp 7.155.000,00	Rp 5.120.000,00
3	31/03/2019	Rp 7.635.000,00	Rp 10.295.900,00
4	30/04/2019	Rp 7.577.000,00	Rp 7.428.600,00
5	31/05/2019	Rp 13.858.200,00	Rp 13.325.200,00
6	30/06/2019	Rp 15.796.000,00	Rp 10.317.500,00
7	31/07/2019	Rp 13.357.000,00	Rp 9.506.100,00
8	31/08/2019	Rp 14.547.000,00	Rp 8.213.350,00
9	30/09/2019	Rp 13.501.000,00	Rp 8.505.500,00
10	31/10/2019	Rp 14.468.000,00	Rp 25.222.400,00
11	30/11/2019	Rp 7.201.000,00	Rp 19.982.800,00
12	31/12/2019	Rp 16.032.000,00	Rp 14.524.900,00

Dari laporan BP-SPAMS Tirta Amanah Tahun 2019 menunjukkan bahwa penerimaan/pemasukan uang iuran setiap bulannya meningkat dari 309 SR pada tahun sebelumnya kemudian meningkat menjadi 510 SR pemakai layanan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Baleraksa untuk mendapatkan air minum bersih di berbagai musim dan pengeluaran perbaikan pipa yang ada di sumber mata air sering pecah, stop kran pecah dan watermater bocor. Hal ini perlu menjadi perhatian agar layanan air minum tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Keuntungan yang di dapatkan BP-SPAMS sebesar Rp 1.012.750.

Pada tahun 2019 ada beberapa kendala BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa mengalami beberapa permasalahan teknis dan partisipasi masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pipa dan stopkran pecah serta watermater bocor
2. Belum terpenuhinya semua jaringan di seluruh wilayah Desa Baleraksa
3. Kebutuhan Resorvoar/Bak penampung yang masih jauh dari cukup
4. Belum mempunyai peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

<sup>166</sup> Laporan PRA RAT (Rapat Akhir Tahunan) BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

5. Kesadaran masyarakat untuk membayar biaya perbulan yang masih rendah.

Pada tahun 2020 ini, tercatat sudah ada 535 sambungan rumah (SR) yang telah terpasang. Setiap bulan 535 SR ini harus membayar penggunaan air (Rp 2.000 /  $m^3$ ). Besar kecil tarikan tergantung dari penggunaan air selama 1 bulan. Setiap ada masyarakat yang ingin menjadi pengguna dibebankan biaya sebesar Rp 725.000 untuk pembelian pipa dan meteran air juga jasa pemasangan saluran. Petugas yang melakukan penarikan adalah pengelola PAMSIMAS Desa Baleraksa. Setiap 1 SR mereka mendapatkan upah sebesar Rp 1.500. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan PAMSIMAS di Desa Baleraksa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Dari hasil penelitian pada tahun 2020 keuntungan yang di dapatkan BP-SPAMS hampir mencapai Rp 10.000.000 dan mulai dikembangkan unit usaha baru berupa isi ulang galon untuk mengembangkan ekonomi. Hal ini akan memberikan dampak positif untuk mengembangkan unit usaha baru yang bernilai ekonomi demi pengembangan lembaga. Pengembangan lembaga ini harus memperjelas tugas dan tanggungjawab agar BP-SPAMS Tirta Amanah dapat memberikan keuntungan pada semua masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan.

c. Pembangunan sarana dan Prasarana

Dalam pembangunan sarana dan prasarana program PAMSIMAS untuk melayani semua masyarakat, diperlukan pengembangan dalam pengelolaan sumber air dengan penambahan BAK Penampung agar pendistribusian air ke sambungan rumah berjalan lancar. Untuk melihat perkembangan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Jumlah Sambungan Rumah di Desa Baleraksa

No	Tahun	SR
1	2018	309
2	2019	510

3	2020	535
---	------	-----

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sambungan rumah dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pengguna akses air bersih di Desa Baleraksa akan meningkatkan iuran penggunaan air sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang memiliki karakter, tingkat pendidikan, kemampuan dalam membayar dan jumlah penduduk disetiap rumah berbeda akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar iuran penggunaan air. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola BP-SPAMS untuk mengunjungi rumah warga 2 sampai 3 dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi ketika pipa besar yang ada di tengah hutan Desa tunjungmuli mengalami kebocoran sehingga harus melakukan perbaikan agar pendistribusian air ke rumah warga lancar.

Pengembangan program kaitanya dengan sarana dan prasarana yang memadai demi ketersediaan air dalam kondisi yang baik dibutuhkan pelatihan untuk sumber daya manusia yang menangani masalah teknis baik adanya kebocoran pipa, kran meter agar penanganan lebih cepat serta pembangunan jembatan gantung sebagai salah satu target untuk mempermudah akses pengelola teknis dalam memperbaiki pipa bocor tanpa harus jalan kaki selama 2 jam menuju sumber air baku. Dilihat dari nilai ekonomi meminimalisir biaya perbaikan sama halnya dengan menekan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan semaksimalnya sesuai dengan kesepakatan di awal.

Tujuan dari pembangunan ini untuk ketercukupan air diseluruh wilayah dengan biaya pemakaian Rp 2.000/M3 dan sumbangan sosial Rp 1.500/M3. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat yang berada di wilayah perdesaan dengan akses air bersih belum mencapai 100% setelah adanya

pembangunan dapat memberikan perubahan tingkat prosentase ketercapaian. Dari aspek ekonomi pembangunan akan terwujud ketika pengelolaan BP-SPAMS dijalankan dengan sebaik mungkin dan muncul pembangunan sarana untuk mendukung kemajuan pengelolaan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Baleraksa pemerintah memiliki peran penting sebagai pemegang kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban negara untuk mendistribusikan penerimaan negara kepada kaum fakir dan miskin.

Pemerintah Desa Baleraksa memberikan penerimaan Dana Desa untuk kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut dengan melaksanakan program PAMSIMAS sesuai dengan tahapan yang sudah ada dalam buku pedoman dari pemerintah pusat. Penyaluran dana untuk keberpihakan pada golongan tidak berdaya menjadi keharusan bagi pemerintah.

Konsekuensi logis dari pendistribusian yang harus dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan diseluruh wilayah untuk itu perlu adanya pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar memandirikan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana air salah satu kewajiban pemerintah Desa dalam mengatasi masalah kesulitan air di wilayah tersebut. Dengan terlayani air bersih akan memberikan manfaat untuk berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 mengalami kesulitan ekonomi akibat dari Covid 19, banyak masyarakat Desa Baleraksa yang memiliki usaha mengalami ke bangkrutan. Untuk itu, sebageian keuntungan yang di dapatkan di alihkan untuk memberikan pinjaman pada masyarakat

2. Kebutuhan dasar manusia

Kebutuhan air dalam menjalankan aktivitas ekonomi di lingkup mikro/rumah tangga menjadi hal sangat penting untuk keberlangsungan hidup.

Dari hasil penelitian tahun 2020 kesulitan air bersih sudah tidak lagi dirasakan masyarakat Desa Baleraksa dengan adanya BP-SPAMS 3 tahun setelah pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program. Di masa pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi akses air dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup kecil.

3. Keadilan sosial

Dalam mewujudkan keadilan sosial pemerintah membuat kebijakan ketersediaan air minum dan sanitasi dengan tidak mendzolimi semua lapisan masyarakat

4. Islam menekankan hak sosial atas harta individu

Dalam hal ini islam mewajibkan bagi individu yang memiliki kelebihan harta untuk mengelurkannya untuk sebagian golongan lainnya. Dalam penelitian terkait program PAMSIMAS bahwa ada sebagian iuran pemakaian air diberikan pada orang yang membutuhkan bantuan.

5. Melindungi yang lemah terhadap yang kuat

Program PAMSIMAS berlandaskan pada keberpihakan terhadap orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak berdaya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan agar akses air minum tidak memberatkan golongan miskin terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas air bersih

6. Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan menjadi salah satu tempat untuk mengemban ilmu bagi generasi muda sehingga perlu fasilitas memadai untuk kenyamanan dalam belajar serta menjaga kesehatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan hampir semua lingkungan sekolah sudah mengakses air minum BP-SPAMS serta pemasangan

Jamban layak diwilayah yang ada di baleraksa. Tingkat kesehatan masyarakat meningkat dengan adanya layanan air minum bersih.

7. Memperhatikan spiritual warga negara

Di Desa Baleraksa sebagai masyarakat menganut agama islam sehingga air menjadi kebutuhan pokok dalam beribadah. Untuk itu adanya program PAMSIMAS memberikan kemudahan umat islam dalam beribadah sehari 5 waktu tanpa kesulitan akses air bersih diwilayah tersebut.

**C. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Baleraksa Perspektif Mashlahah**

Strategi pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan tujuan ketercukupan air bersih. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup kompleks sehingga dalam menanggulangi ketidakberdayaan menjadi berdaya perlu kesamaan persepsi.

Dalam menerapkan nilai-nilai islam yang sering disebut dengan *maqashid syariah* dalam program PAMSIMAS, pemerintah menitik tekankan pada masyarakat yang tidak berdaya dalam penyediaan air minum dan sanitasi dengan melibatkan masyarakat sebagai penanggungjawab atas pembangunan sarana sumber baku yang di dasarkan pondasi keimanan yang kuat. Penerapan maqahid syariah dalam program PAMSIMAS di Desa Baleraksa di ukur dari 5 unsur pokok yaitu:

1. Menjaga agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa menerapkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan pemasangan jamban sehat di masing-masing rumah.

Maqashid syariah dalam point satu sesuai dengan ayat al-quran yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama islam. berdasarkan ayat diatas bahwa islam memberikan kebebasan dalam

meyakini sang pencipta. Hal ini dapat di pahami bahwa kesadaran masyarakat dalam mengaplikasikan hidup bersih atas dasar keimanan untuk beribadah pada sang pencipta sebagai bentuk kemashlatan seorang muslim hubungan-Nya antara manusia dan tuhanNya dengan menunaikan kewajiban-Nya.

## 2. Melindungi nyawa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa kualitas sumber air yang dikonsumsi masyarakat merupakan sumber mata air ditengah hutan sama dengan kualitas air Aqua yang dapat dikonsumsi secara langsung.

Hal ini sesuai dengan jaminan kelangsungan hidup manusia dengan pemilihan sumber air untuk menjaga kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut. Jadi penerapan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa juga memperhatikan nilai maqashid syariah dengan tujuan menjaga nyawa.

## 3. Melindungi Akal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Baleraksa dalam program PAMSIMAS keselarasan dalam melindungi dan melestarikan sumber air baku serta kebermanfaatan yang di rasakan masyarakat.

Penerapan maqashid syariah dalam program PAMSIMAS untuk menjaga akal salah satunya kebermanfaatan sumber air yang dirasakan masyarakat dan keselarasan dalam melindungi sumber air salah satu ciri orang berakal sehingga menghindari minuman yang tidak memberikan manfaat bagi kesehatannya dalam jangka panjang maupun pendek.

## 4. Melindungi keturunan

Berdasarkan wawancara pengelolaan program PAMSIMAS salah satu penerapan maqashid syariah dalam melindungi keturunan dengan memperhatikan keberlanjutan program untuk generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan dalam usaha tidak merusak sumber air yang dikelola agar generasi akan merasakan keberlimpahan air di masa mendatang tidak hanya bertahan 10 tahun saja. Dampak

positif yang ditimbulkan dari pembangunan sumber air adalah tercukupinya akses air sehingga perlu pengelolaan yang baik

#### 5. Melindungi harta

Berdasarkan hasil wawancara biaya pemakaian dan pemasangan relatif murah, hal ini salah satu bentuk dari melindungi harta yang dimiliki agar masalah kebutuhan yang cukup kompleks bisa terpenuhi dengan biaya yang relatif murah dalam mengakses air bersih di Desa Baleraksa.

Paradigma tauhid dalam menjalankan setiap aktivitas yang dilakukan manusia sebagai pemegang amanah dengan mengikuti rambu-rambu syariah untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan. Filosofi dasar keadilan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tidak mendzolimi. Konsekuensi logis dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat lebih banyak masalah dibandingkan dengan mafsadah dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan air aman maka sesuai dengan nilai ekonomi.

Penelitian program penyediaan air aman dan sanitasi berbasis masyarakat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hajat orang banyak di Desa Baleraksa yang mengalami kesulitan mengakses air bersih di musim kemarau dan harus mengeluarkan uang Rp 600.000 untuk 500 liter dipakai 3- 4 hari dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahkan sampai masyarakat miskin yang kurang mampu dalam membeli air bersih dibuatkan sumur khusus untuk bisa menikmati air bersih dimana masyarakat harus bangun jam 3 pagi dan menunggu antrian.<sup>167</sup> Berikut adalah tabel kondisi akses air sebelum ada program PAMSIMAS di Desa Baleraksa:

---

<sup>167</sup> Laporan PRA RAT (Rapat Akhir Tahunan) BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Tabel. 16

Kondisi Akses Air Sebelum PAMSIMAS<sup>168</sup>

Jumlah Penduduk kondisi Masyarakat				
KK	Jiwa	Sudah akses air		Prosentase
2.074	7.805	KK	Jiwa	%
		1.187	4.467	57,23
		Belum Akses Air		Prosentase
		KK	Jiwa	%
		887	3.338	42,77

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih mencapai 42,77% dari 2.074 KK dan yang sudah mengakses air di Desa Baleraksa 57,23% dari 7.805 Jiwa. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar air di wilayah tersebut untuk memenuhi kecukupan air bersih dengan melaksanakan program PAMSIMAS.

Hasil penelitian yang dilakukan setelah program PAMSIMAS Desa Baleraksa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi disaat musim kemarau tidak lagi menjadi kekhawatiran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih. Adapun kondisi akses air bersih pascamasuknya program PAMSIMAS di Desa Baleraksa sebagai berikut:

Tabel. 17.

Kondisi Akses Air Pasca PAMSIMAS<sup>169</sup>

Jumlah Penduduk kondisi Masyarakat				
KK	Jiwa	Sudah akses air		Prosentase
2.077	7.812	KK	Jiwa	%
		1.833	6.896	88,27
		Belum Akses Air		Prosentase
		KK	Jiwa	%

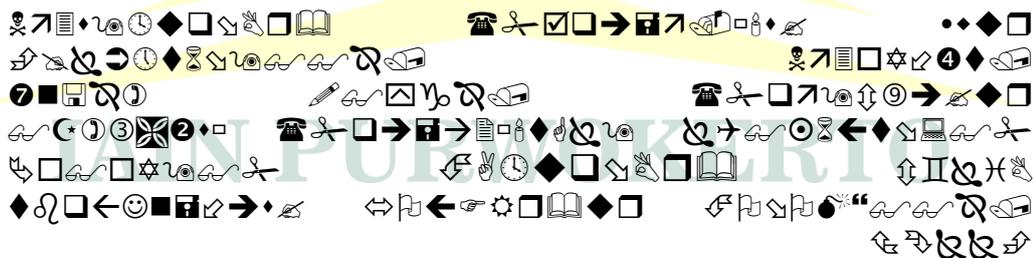
<sup>168</sup> Wawancara dengan Fasilitator tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>169</sup> Wawancara dengan Fasilitator tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

		244	916	11,73
--	--	-----	-----	-------

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang sudah mengakses air mencapai 88,27% dari 2.077 KK ( Kepala Keluarga) dan yang belum akses air bersih 11,73 % dari 7.812 Jiwa. Oleh karena itu, perubahan akses air hampir 30 %. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana layanan air bersih di Desa Baleraksa hampir 100%

Tujuan utama syariat islam adalah tercapainya kesejahteraan manusia yang dititik beratkan pada perlindungan lima pilar maqashid syariah. Untuk mewujudkan tujuan hidup tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cukup kompleks sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam undang-undang memiliki kewajiban melindungi masyarakat yang tidak berdaya dengan membuat program dengan keberpihakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan sosial. Landasan ini terdapat dalam firman Allah di surat al-Baqarah ayat 188:



Artinya:.. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>170</sup>

Program Penyediaan air minum dan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasar sumber air minum

<sup>170</sup> Lihat QS.Al-Baqarah ayat 188.

untuk kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi dan distribusi di dalam rumah tangga. Aktivitas yang dilakukan manusia sangat erat kaitannya dengan air seperti memasak, mandi, ibadah, mencuci pakaian dan lain-lain.

Air dalam ekonomi islam tidak boleh di miliki individu ataupun kelompok tertentu dikarenakan termasuk berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Allah sangat melarang orang yang berbuat dzolim, eksploitasi yang di sebutkan dalam ayat suci al-Quran.

Dalam penelitian program ini sudah di telah secara mendalam bahwa setiap masyarakat indonesia memiliki hak untuk menikmati akses air bersih baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi wilayah yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat dalam menyediakan sumber air untuk di distribusikan ke sambungan rumah dengan biaya yang sangat murah serta kulaitas sumber terjamin. Dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi dengan tidak mendzolimi pihak lain.

Pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, operasional serta keberlanjutan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana jangka panjang nasional (RPJPN) yang merupakan amanat dari pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia 1945.oleh karena itu penataan ulang dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan mencapai 20 tahun. Strategi dalam mengentaskan ketidakberdayaan akan akses air minum dan saniatsi layak di Desa Baleraksa belum mencapai 100% sehingga melaksanakan sosialisasi dan tahapan program di sesuaikan dengan aturan dan pedoman dari pemegang kebijakan.

Program PAMSIMAS ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Persiapan dan seleksi Desa

Dalam tahap persiapan dan seleksi ada tiga kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi tingkat Kabupaten dan Desa serta pembentukan TIM Penyusun Proposal.<sup>171</sup>

Dari hasil penelitaian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini Desa Baleraksa menjalankan sosialisasi mengenai program PAMSIMAS yang di hadir oleh Kepala Desa, Bidan Setempat, AMPL, Sanitarian, Fasilitator serta perwakilan dari semua lapisan.

Setelah itu pembentukan tim penyusunan proposal dari beberapa perwakilan dusun-dusun yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi. Tahapan ini dilakukan agar program PAMSIMAS dapat di sampaikan ke seluruh warga masyarakat yang membutuhkan sarana air minum aman dan sanitasi layak dengan melibatkan beberapa pihak serta masyarakat secara langsung dalam kegiatan tersebut agar pembangunan sarana dan prasarana air minum aman dan sanitasi layak sesuai dengan tujuan awal.

2. Penyusunan Proposal<sup>172</sup>

Penyusunan Proposal ini dibuat untuk pengajuan bantuan Pamsimas dari pelaksanaan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi ) tahap 1. Imas ini terdiri dari 2 tahapan yaitu tahapan persiapan dan seleksi Desa serta tahapan perencanaan. Hasil penelitian dalam tahap ini Desa Baleraksa mendapatkan penolakan hampir 3 kali pengajuan proposal karena belum memenuhi kriteria.

3. Penetapan Calon Desa<sup>173</sup>

Penetapan Calon Desa dimulai melalui evaluasi surat minat dan proposal yang dilakukan oleh pakem lalu penetapan Desa dilakukan oleh pokja AMPL. Dalam tahapan ini yang menentukan proposal yang diajukan oleh desa yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah Pokja AMPL yang disesuaikan dengan kriteria sasaran Desa yang terdapat di dalam pedoman PAMSIMAS.

---

<sup>171</sup> Wawancara DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

<sup>172</sup> Wawancara DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

<sup>173</sup> Wawancara DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

b. Perencanaan<sup>174</sup>

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.<sup>175</sup>

1. Pemicuan perubahan perilaku<sup>176</sup>

Dilakukan oleh sanitarian dalam rangka mempromosikan kesehatan penertiban buang air sembarangan atau SBS dan peningkatan kualitas jamban. Hal ini dilakukan agar tujuan dari program PAMSIMAS memberikan perubahan dalam perilaku hidup bersih dan sehat dengan dilakukannya pemicuan masalah buang air besar sembarangan bagi kesehatan dan lingkungan.

2. Pelaksanaan IMAS tahap 2<sup>177</sup>

Diikuti semua komponen masyarakat baik perempuan, laki-laki, tua dan muda, miskin, masyarakat kebutuhan khusus disabilitas, masyarakat adat. Di Desa Baleraksa dalam tahap Imas 2 di hadiri oleh 2 Dusun sebagai sasaran akses air minum.

3. Pembentukan kelembagaan masyarakat<sup>178</sup>

Terdiri dari KKM, SATLAK dan KPSPAMS. Untuk pembentukan kelembagaan di Desa Baleraksa melalui kesepakatan antara pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat.

4. Penyusunan Program jangka menengah air minum kesehatan dan sanitasi (PJM –PROAKSI)<sup>179</sup>

---

<sup>174</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>175</sup> UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

<sup>176</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>177</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>178</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>179</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Dirumuskan dari hasil IMAS yang di integrasi dalam RKPDES dan RPJMDES, tahapan penyusunan PJM PROAKSI adalah penyusunan daftar usulan kegiatan PJM PROAKSI di mulai dari tingkat dusun, pemilihan prioritas opsi kegiatan PROAKSI, PJM PROAKSI dan opsi RKM, PJM PROAKSI terkait berita acara kesepakatan.

5. Penyusunan RKM<sup>180</sup>

Dokumen RKM merupakan kegiatan PJM Proaksi IMAS tahap dua yang terdiri dari dokumen RKM yaitu perencanaan teknis SPAMS, penyusunan DED dan spesifikasi teknis pengerjaan (RKS), perencanaan pelatihan masyarakat serta perencanaan pelatihan promosi kesehatan. Dokumen ini dilakukan oleh KKM melalui Satlak bersama dengan msyarakat, masyarakat adat dan penyandang disabilitas dan KPSMPS yang difasilitasi oleh Kader AMPL, TFM, Sanitarian

c. Pelaksanaan<sup>181</sup>

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan adalah melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam dokumen kegiatan yang mana dalam tahapan ini terdiri dari pencairan dana BLM selain itu pelaksanaan pelatihan masyarakat seperti pelatihan teknis, kesehatan, keuangan dan kelembagaan, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk air minum dan sanitasi. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Baleraksa pelaksanaan pencairan uang bantuan sebelum dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Tunjungmuli.

---

<sup>180</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>181</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

d. Operasional dan pemeliharaan<sup>182</sup>

Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan iuran guna membiayai operasi dan pemeliharaan sarana SPAMS. Pelayanan air minum sangat ditentukan tahapan ini. Dari hasil penelitian untuk pemeliharaan harta/kas yang dimiliki BP-SPAMS Tirta Amanah dengan menyepakati iuran untuk sambungan rumah 200/M3 sedangkan sambungan sosial 1500/M3 dan untuk pemasangan 750.000. hal ini dilakukan untuk keberlanjutan program akses air minum tidak hanya 1-5 tahun akan tetapi bisa mewarisi generasi mendatang dalam menikmati kelimpahan air bersih di wilayah tersebut.

e. Penguatan keberlanjutan<sup>183</sup>

1. Peningkatan Kapasitas Fasilitas air minum dan sanitasi

Peningkatan kelembagaan, keuangan, teknis, pengelolaan lingkungan dan fungsi sosial. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk meningkatkan fasilitas belum secara menyeluruh dilakukan karena keuntungan yang di dapatkan masih dibawah target yang di harapkan, hanya saja sudah membuka unit usaha baru

2. Asosiasi Tingkat Kabupaten

Asosiasi ini dilakukan sebagai wadah kerjasama KPSPAMS

---

<sup>182</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

<sup>183</sup> Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Baleraksa dilihat dari sudut pandang nilai-nilai ekonomi islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan demi tercapainya masalah untuk seluruh umat manusia dengan memperhatikan kepercayaan yang diberikan dalam mengelola sumber air atau aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hajat orang banyak harus mengikuti aturan yang diberikan agar tujuan tercapai.

Program penyediaan air minum dan sanitasi dalam memenuhi kebutuhan air ada yaitu ketersediaan sumber air dan sumber daya manusia. Konsekuensi logis bahwa terwujudnya program ketika keduanya terpenuhi. Dengan adanya sumber air akan memberikan kemudahan dalam memutuskan pembangunan sarana dan prasarna di sesuaikan dengan letak geografis di Desa tersebut. Untuk Desa Baleraksa merupakan dataran tinggi harus menggunakan pipanisasi gravitasi, dimana air dialirkan dari tempat tinggi ke tempat rendah.

Sumber daya manusia menjadi pelaku utama yang bertanggungjawab baik sebelum pelaksanaan program maupun setelah pelaksanaan sebagai pengelolaan layanan untuk menjaga harta yang sudah dikeluarkan pemerintah Desa dan masyarakat demi terwujudnya ketersediaan air. Ketika pemilihan sumber daya manusia kurang tepat akan menghambat keberlanjutan program.

Seperti sabda Rasullulah SAW yang berbunyi : “Barangsiapa yang dibebankan oleh Allah SWT untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya”. (HR. Bukhari & Muslim,Shahih)<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Kurnia Sukma Tari,” Implikasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Deskriptif Pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Desa Baleraksa memiliki sumber air dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BP\_SPMS Tirta Amanah untuk menjadi lebih maju. Apalagi melibatkan BUMDES dalam pengelolaan BP\_SPAMS sehingga mempermudah koordinasi antara pihak Desa dan pengelola.

Pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang melibatkan langsung proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan. Hal ini dapat di pahami bahwa layanan air minum berbasis masyarakat dengan rasa memiliki program akan memberikan rasa tanggung jawab atas pemeliharaan pembangunan sumber air yang dilaksanakan masa sekarang akan membawa dampak positif generasi mendatang. Oleh karena itu setiap permasalahan yang timbul dari layanan air minum dapat di selesaikan dengan musyawarah antara masyarakat, pengelola dan pemerintah Desa sebagai bagian dari pembangunan tersebut.

## 2. Keadilan

Dalam banyak ayat, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam setiap aktivitas yang dilakukan di dunia.<sup>185</sup> Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa tegaknya keadilan akan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tidak merugikan golongan satu dengan yang lain dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, hilangnya keadilan akan merusak tatanan sosial dan menambah permasalahan baru.

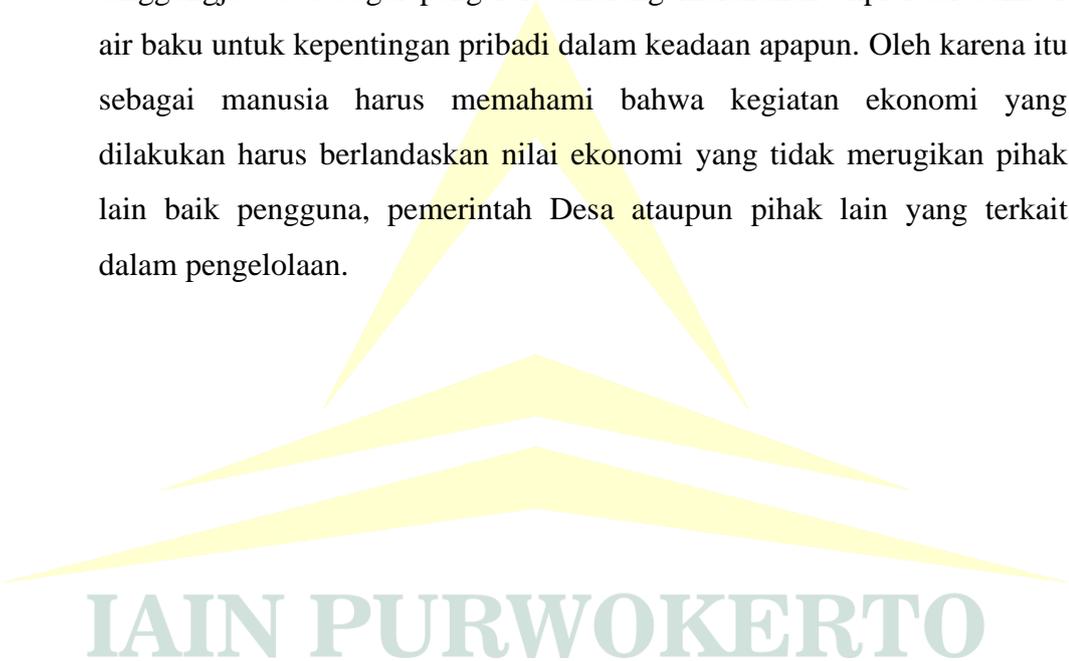
Program PAMSIMAS dibangun dengan tujuan tercapainya ketersediaan air di seluruh wilayah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini memiliki tantangan tersendiri agar dapat terwujud program yang berkelanjutan. Untuk itu di perlukan komitmen sumber daya manusia yang akan mengelola program dengan efektif dan efisien sesuai yang di harapkan oleh pemerintah dengan memelihara harta/ modal yang diberikan dari berbagai sumber yang sudah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>185</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro*, ...hlm. 35.

Dari hasil penelitian di Desa Baleraksa bahwa program PAMSIMAS menerapkan nilai keadilan dalam memberikan pelayanan akses air minum tanpa merugikan satu golongan dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak membedakan iuran bagi golongan masyarakat untuk mendapatkan layanan BP-SPAM Tirta Amanah sebagai pengelola yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam surat keputusan kepala Desa yang disepakati seluruh lapisan masyarakat dalam forum setelah pelaksanaan pembangunan.

Dalam sudut pandang nilai keadilan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengelola dilarang melakukan eksploitasi sumber air baku untuk kepentingan pribadi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu sebagai manusia harus memahami bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berlandaskan nilai ekonomi yang tidak merugikan pihak lain baik pengguna, pemerintah Desa ataupun pihak lain yang terkait dalam pengelolaan.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan di Desa Baleraksa melibatkan masyarakat sejak dari :

- a) Perencanaan

Dalam proses perencanaan akan dibangunnya program PAMSIMAS di Desa Baleraksa masyarakat dapat memberikan pendapatnya mulai dari penentuan lokasi sumber, penentuan sasaran program, sumber dana sampai dengan penentuan struktur pelaksana pembangunan program sarana penyediaan air minum dan sanitasi. Sebelum proses pelaksanaan pembangunan dilakukan, sumber daya pelaksana program diberikan pelatihan-pelatihan dasar maupun teknis pembangunan saluran air. Sehingga pembangunan program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik sesuai standar operasional yang ada.

- b) Pelaksanaan program

Proses pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa dalam pencairan dana dilakukan secara bertahap. Ketika pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi dimulai masyarakat sama-sama ikut bergotong royong.

- c) Pengendalian dan pengawasan program

Setelah proses pelaksanaan program PAMSIMAS berjalan, maka dilakukan evaluasi program. Sehingga ketika ada kerusakan dapat segera di perbaiki. Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa. Dimana setelah dilakukannya evaluasi, pemerintah Desa

Baleraksa, pengelola PAMSIMAS dan juga masyarakat sepakat untuk membangun unit usaha baru dalam bentuk isi ulang galon.

2. Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Baleraksa dilihat dari perspektif masalah sudah sesuai karena berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan untuk kebutuhan saat ini dan mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan juga pengendalian serta pengawasan program PAMSIMAS. Tumbuhnya unit usaha baru untuk membangkitkan ekonomi masyarakat juga sebagai bentuk keberlanjutan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pelaporan kegiatan program PAMSIMAS satu bulan untuk mempermudah evaluasi pelaksanaan
2. Pembuatan jembatan untuk mempermudah perbaikan penampungan sumber air baku yang berada di tengah hutan yang tidak dapat dilewati kendaraan bermotor.
3. Penambahan jumlah bak penampung
4. Mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali dengan pengguna air untuk evaluasi program PAMSIMAS

## **C. Kelemahan penelitian dan saran penelitian selanjutnya**

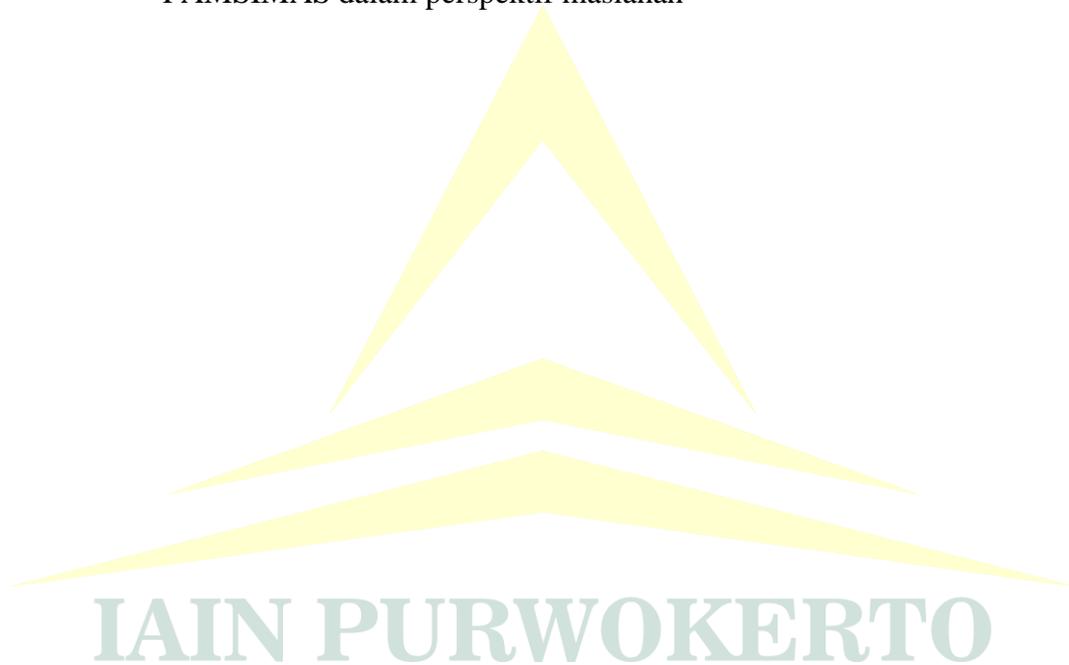
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa kelemahan dari peneliti:

1. Teori yang digunakan referensinya masih sangat sedikit.
2. Metode kualitatif dengan pendekatan lapangan belum bisa menjawab permasalahan secara mendalam

3. Cakupan wilayah yang digunakan hanya dalam lingkup desa sehingga penelitian program PAMSIMAS dalam perspektif masalah belum secara menyeluruh.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian program PAMSIMAS di Tingkat Kabupaten untuk mengetahui secara detail terkait dengan program PAMSIMAS dalam perspektif masalah di seluruh wilayah.
2. Untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian tentang program PAMSIMAS dalam perspektif masalah



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Afriadi, Taufik dan Hadi Wahyono, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, 2012 *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*
- Amirus,” Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, *Equilibrium*,Vol.3, No.2, Desember. 2015.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011 . *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Budy Pratama, Arif “Evaluasi berjalan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ongoing evaluation on community-based clean water and sanitation program” *Jurnal ilmu administrasi*, vol.XV No 2, ( Universitas tidar 2018.
- Bashith, Abdul. 2012. *Ekonomi Kerakyatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sketor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Beik, Syauqi et.al, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Chaerunnissa,Chika, ” Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung)”, *Politika*, Vol. 5, No.2, Oktober 2014.
- Chamidah, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umer . 2001. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk, Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Faisal, Sanfiah 1999. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.

- Faza, Ilham Tegar dan Sri Suwitri,” Evaluasi Keberhasilan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Tegal (Kajian Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- Fitriyani , Nurul dan Mardwi Rahdriawan “Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas Di Kecamatan Tembalang” Jurnal Pengembangan Kota (2015) ,Volume 3 No. 2.
- Fitriyani, Nurul” Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas Di Kecamatan Tembalang”, Jurnal Pengembangan Kota, Volume 3 No. 2 (80–89), Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Hendrie Anto, M.B. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- <https://www.ampl.or.id/program/program-nasional-penyediaan-air-minum-dan-sanitasi-berbasis-masyarakat-pamsimas-/2>, lihat websit pamsimas.org, 06 November 2019 pukul 13.54
- [http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/rispam/8346\\_RISPAM-3303\\_a1695a.pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rispam/8346_RISPAM-3303_a1695a.pdf), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2033
- Huda, Nurul et.al, 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Imron, Arifin. 1996 .*Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Keagamaan*, Malang: Kalimashadah Press.
- Khan, M Fahmi. *Shatibi’s Objectives of Syari’ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam *Abul Hasan M,Sadeq dan Aidit Ghazali*, Reading in islamics Thought.
- Khoerunisa,Tiara “Pemeliharaan Lingkungan Berlandaskan Prinsip Maqashid Syariah Environmental Maintenance Based On The Sharia Maqashid Principles”Universitas Islam Bandung.
- K Yin, Robert. 2014. Studi Kasus : *Desain & Metode*, terj. M. Dauzi Mudzakir .Jakarta: Rajawali Press.
- Lihat di websit pamsimas.org diakses pada tanggal 18 november 2019 pada pukul 10.26
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabet.

- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miskari,” Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah”, *Al-Mashlahah*, Volume 14 Nomor 1 April 2018.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*, Cet. 13 Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazar T. Moch dkk, ” Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Teknik Sipil*, volume 1 spesial issue, nomor 4 februari universitas syiah kuala. 2018.
- Nengsi, Sri,” Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar”, *J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat* ,Vol. 4, No. 1, Mei 2018.
- Nasuka, Moh , “Maqāṣid Syarī’ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah”, *jurnal Iqtishoduna* p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia, Vol. 6 No. 2 Oktober 2017.
- Purwana, Agung Eko” Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Justitia Islamica*, Vol.11/No.1/Jan-Juni 2014; 22
- Pusparini, Martini Dwi ”Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”, *Islamic Economics Journal* Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Qomaruddin , Mochammad dkk, “Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat Pada Program Pamsimas Di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara”, *Prosding seminar nasional publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat “ implementasi Penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kekayaan intelektual” Universitas Muhammadiyah Semarang 30 September 2017.*
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Rofiana, Vifin “ Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)”, *Lipa The Indonesia*

Journal of Public administration, Vol 1 Nomor 2 Juli-Desember 2015.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 BAB IV, <https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id/rpjmd/>, jam 14:22 wib.

Sardar, Ziauddin” Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Ziauddin, NIM : 041114007, yang diuji pada tanggal 9 Februari 2016 Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Suhono, Andreas. *Pedoman Umum Program PAMSIMAS*. 2016. Jakarta: Sekretariat PAMSIMAS, 2016.

Takhim, Muhamad” Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi.

Toriquddin, Moh “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Tri Astuti, Marlina dan Mardwi Rahdriawan, ”Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Di Lingkungan Permukiman Kecamatan Mijen, Semarang”, Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 4. 2013.

Trijuniyanto, Onny” Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program Pamsimas Di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember , Program Pascasarjana Surabaya; 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia

Wawancara dengan Ibu Silah Sebagai Kepala bidang permukiman di Dinas Permukiman Kabupaten Purbalingga,

Wawancara dengan Ketua satlak program pamsimas desa baleraksa

Widiyanti , Myta Retno dkk, “Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Klaten”, Magistra No.101 Th.XXIX Sepetember 2017.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode*, terj. M Dauzi Mudzakir .Jakarta:Rajawali Press.

- Bungain, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Cetakan ke 17. Bandung: Alfabet.
- Janah, Nasitotul dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 20 No 2 (2018) DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045, Volume 20, Number 2 (2018).
- Ramadhan, Muhammad "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)" *Analytica Islamica*: Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Mas'ari, Ahmad "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau* ISSN (Online) : 2579-5406 Pekanbaru, 18-19 Mei 2017.
- Suhono, Andreas. 2016. *Program PAHSIHAS*. P-1. Jakarta.
- Nugroho, Ardhianto Adhi dan Maryono, dalam jurnal berjudul *Peluang Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (PAMSIMAS) Di Kabupaten Kendal*, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 2016.
- Kholiq, Abdul "Evaluasi Keberhasilan Program Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes", *Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, Volume 20, No 2, Desember 2014.
- Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- Janah, Nasitotul dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 20 No 2 (2018) DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045, Volume 20, Number 2 (2018).
- Ramadhan, Muhammad "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)", *Analytica Islamica*: Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Mas'ari, Ahmad "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Fakultas Sains dan Teknologi", *UIN Sultan Syarif Kasim Riau* ISSN (Online) : 2579-5406 Pekanbaru, 18-19 Mei 2017.

Hamid, Hendrawati.2018.*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*.Makasar: De La Macca).

Profil Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

[https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,\\_Karangmoncol,\\_Purbalingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Baleraksa,_Karangmoncol,_Purbalingga), 1 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB

Wawancara DINPRUMKIM Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Wawancara Sekdes Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga 2 Januari 2021

Wawancara Ketua Pengelola BP- SPAMS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Laporan PRA RAT (Rapat Akhir Tahunan) BP-SPAMS Tirta Amanah Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Wawancara dengan pengelola program PAMSIMAS Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Vidio PAMSIMAS Baleraksa, Kolaborasi PAMSIMAS dan PEMDES Menuju Universal Akses 2019.

Dinkes Purbalinggakab.go.id, Profil Kesehatan Kab Purbalingga Tahun 2016 dalam Tabel. 61

Wawancara dengan Fasilitator tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Herawati , Pipit, Kurnia Wahyudi , Irvan Afriandi,” Determinan Kepemilikan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Jawa Barat (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012)”, JSK, Volume 3 Nomor 3 Maret Tahun 2018.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Lihat di QS al-Baqarah ayat; 256

Lihat QS Al-Hajj ayat :40

Lihat QS At-Taubah ayat:41

Lihat Qs al-Maidah ayat 32

Lihat QS Al-Baqarah ayat 179

Lihat QS Al-Baqarah ayat 219

Wimra, Zelfeni.” Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Januari 2017.

<https://republika.co.id/amp/n99a472>,”Kepemilikan Sumber Daya Air dan Maqashid Syariah”, 21/01/2021 Pukul 20.04 WIB.

Ramadhan, Muhammad ”Maqasid Syari’ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)”, Analytica Islamica: Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2019.

Ilyas Rahmat,” Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume Inomor 1, Maret 2015, ISSN. 2502-6976, hlm 12, diakses pada tanggal 9 januari 2021 pukul 8.00 WIB.

Fahlefi Rizal,” Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah” Jurnis Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 228 <https://media.neliti.com/media/publications/93180-ID-implementasi-maslahah-dalam-kegiatan-eko.pdf>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Fauzia , Ika Yunia dkk. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah. Jakarta: Kencana.

Sukma Tari, Kurnia. Implikasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Deskriptif Pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Lihat QS.Al-Baqarah ayat 188.

A.Karim Adiwarmn. 2008. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



**IAIN PURWOKERTO**